

M. Adil Lanjutkan Kepemimpinan

Majalah Bank Sumsel Babel

Finansial

R U J U K A N & I N S P I R A S I B I S N I S



Hattrick BSB di Annual Report Award (ARA)



2017

INSIGHT:

HUT ke-60 Bank Sumsel Babel
Menguji Kematangan di Era Digital

FINANSIAL & MODAL:

Menunggu Rekor Baru
di Tahun Bullish

HARMONI:

Transaksi Nontunai Pemda,
Pijakan untuk Gebrakan lebih Masif

LEASURE:

Surga Tersembunyi
di Gili Labak

 **BANK
SUMSELBABEL**

dengan **BSB CASH**

**BAYAR
JADI
MUDAH**



miliki segera kartu **BSB CASH**
Bank Sumsel Babel
dan nikmati **Keuntungan**



1500711

<http://www.banksumselbabel.com>

4	Dapur Redaksi
<hr/>	
	Insight
5	HUT KE-60 BANK SUMSEL BABEL Menguji Kematangan di Era Digital
<hr/>	
	Laporan Utama
8	Annual Report Award Bank Sumsel Babel Cetak Hattrick
11	RUPS LUAR BIASA BSB M. Adil Lanjutkan Kepemimpinan
12	Menyisir Peluang Diversifikasi
14	Ekonomi Sumsel 2018 Bakal Kian Menggeliat
18	Investasi SDM, Modal Ekonomi Berkelanjutan
<hr/>	
	Finansial & Modal
21	Gairah Menyala di Tahun Anjing Bumi
24	Menunggu Rekor Baru di Tahun Bullish
27	PASAR OBLIGASI 2018 Menangkal Sentimen Global
30	TRANSAKSI NONTUNAI PEMDA Pijakan untuk Gebrakan Lebih Masif
<hr/>	
	Human Capital
33	DUTA LAYANAN BANK SUMSEL BABEL Mengukur Kualitas Layanan di Barisan Terdepan
<hr/>	
36	Leasure Surga Tersembunyi di Gili Labak
39	Bijak Investasi Harga Nyawamu & Premi Asuransi
41	Etalase DEFISIT BPJS KESEHATAN Anggaran Tekor, Siapa Teledor?
44	Bidik Lensa



Pelindung:

Direktur Utama BANK SUMSEL BABEL
Muhammad Adil

**Pemimpin Umum/
Pemimpin Redaksi:**

Pemimpin Divisi Sekretaris
Perusahaan & Hukum
Faisol Sinin

Wakil Pemimpin Redaksi:

Surya Mahendra Saputra

Sidang Redaksi:

Board of Directors BANK SUMSEL BABEL
Pemimpin Divisi Sekretaris
Perusahaan & Hukum
Surya Mahendra Saputra

Redaktur:

Jefriansyah

Reporter:

Dinda Wulandari, Ibnu Holdun,
Muhammad Ikhsan

Fotografer:

Teddy Pratama Putra
KOMUNITAS FOTOGRAFER
BANK SUMSEL BABEL

Distribusi:

Ansori Fauzi
Sin Karyadi

Percetakan:

PT Aksara Grafika Pratama
Isi di luar tanggung jawab percetakan

ALAMAT REDAKSI:

Kantor Pusat Bank Sumsel Babel Lantai 11
Jl. Gubernur H. Ahmad Bastari No. 7
Silaberanti Kec. Seberang Ulu I,
Jakabaring Palembang
Email: redaksifinansial@gmail.com

dapur redaksi

Bank Sumsel Babel, bank kebanggaan dan harga diri masyarakat di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ini telah menginjak usia ke-60 tahun. Usia yang sungguh penuh dengan kematangan. Usia yang sarat dengan pengalaman.

Perjalanan perusahaan juga menyiratkan perjuangan untuk menggapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Sejak beberapa tahun terakhir, perusahaan terus berbenah. Transformasi dirintis. Misinya sudah tentu demi membawa Bank Sumsel Babel menjadi tuan rumah di daerah sendiri.

Transformasi di tubuh perusahaan yang berdiri pada 6 November 1957 ini dilakukan hampir di setiap bagian, mulai dari mutu SDM hingga kualitas produk dan layanan. Memastikan transformasi efektif bergulir sesungguhnya sama seperti mengakselerasi masa depan perusahaan.

Artinya, dengan prospek yang kian cemerlang, kinerja Bank Sumsel Babel ke depan sungguh menjanjikan. Harapannya, perusahaan dapat memelihara pertumbuhan sehingga kontribusi berupa dividen dapat terus mengalir ke pemegang saham.

Kami dari Tim Redaksi akan memotret dan melaporkan betapa konsep transformasi Bank Sumsel Babel membuahkan pencapaian dan apresiasi yang membanggakan. Tema ini juga bakal dilengkapi dengan beragam topik lain yang tak kalah menarik untuk disajikan dalam terbitan majalah edisi ke-11 ini.

Majalah *Finansial* senantiasa mendukung kegiatan sosialisasi program dan misi yang dijalankan oleh Bank Sumsel Babel untuk mencapai tujuan menjadi bank daerah terbaik, sekaligus menjadi tuan rumah dalam geliat perekonomian dan pembangunan di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Majalah ini ingin menjadi sarana bagi Bank Sumsel Babel dalam menumbuhkan budaya dan etos kerja bagi karyawan, sekaligus menjadi duta untuk memberikan citra positif bagi kemajuan bank yang kita cintai ini. Untuk itu, terimalah salam hormat dari kami.

Faisol Sinin

Pemimpin Redaksi

HUT KE-60 BANK SUMSEL BABEL Menguji Kematangan di Era Digital

Usia ke-60 tahun merupakan fase hidup yang penuh kematangan. Tak terkecuali bagi Bank Sumsel Babel, di usianya saat ini BPD kebanggaan Sumsel dan Babel semakin matang dalam kancah industri perbankan yang kian diselimuti arus digital.

Perjalanan kinerja perusahaan selama beberapa tahun terakhir juga menyiratkan perjuangan untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Sejak 2014, di bawah kepemimpinan Direktur Utama Muhammad Adil, perusahaan

terus berbenah. Transformasi, begitulah kata yang seringkali diucapkan Adil untuk membawa Bank Sumsel Babel menjadi tuan rumah di daerah sendiri.

Transformasi di tubuh perusahaan yang berdiri pada 6 November 1957 itu dilakukan hampir di setiap bagian, mulai

dari kualitas produk hingga SDM. Bank Sumsel Babel tak hanya menekan rasio NPL tapi juga mengurus pelatihan bagi SDM hingga kursus kecantikan.

Adil mengatakan ada tujuh poin dalam *roadmap* yang telah disusun untuk transformasi perseroan. Salah satunya terkait dengan sumber daya manusia.

“Dalam poin SDM itu banyak yang perlu kami benahi. Kami sudah membuat pelatihan untuk *marketing* hingga pelatihan kecantikan atau *beauty class* bagi pegawai di *frontliner*. Mengapa? Karena itu ternyata penting, jika karyawan kami bisa merias diri dengan cepat maka waktu untuk melayani nasabah lebih banyak. Bayangkan setelah mengikuti *beauty class*, karyawan kami bisa *make up* hanya dalam waktu 4 menit dan maksimal 7 menit,” paparnya.

Lantas, setelah berjuang membenahi kekurangan di sana-sini, apakah perusahaan telah menuai hasil yang positif? Mari kita tengok dari kinerja yang ditorehkan.

Sepanjang semester I/2017, Bank Sumsel Babel telah mencetak laba Rp227 miliar, atau melesat 12,38% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp202 miliar.

Menurut Adil, pihaknya berusaha kuat di kantor-kantor cabang. Target bisnis di setiap kantor cabang dipertajam. Selama ini, kantor cabang

Dari enam kategori yang disurvei, Bank Sumsel Babel meraih peringkat terbaik ke-1 ATM serta satpam, terbaik ke-2 untuk kategori *costumer service*, terbaik ke-3 *teller* dan fisik *banking hall*, serta terbaik ke-4 untuk kategori layanan telepon.

tidak menghitung laba atau rugi. Oleh karena itu pihaknya melakukan evaluasi. Perusahaan juga menerapkan KPI (*key performance indicator*) yang memuat rugi atau laba.

“Jadi, mulai berhitung. Jika ambil dana mahal, mereka harus mengukur kuat atau tidak. Alhamdulillah untuk 28 kantor cabang plus kantor cabang pembantu tinggal beberapa saja yang nilainya kurang,” katanya.

Saat ini, aset perseroan sudah mencapai Rp22 triliun. Menurut Adil, pertumbuhan aset ditopang *funding* yang juga naik. Termasuk juga modal bertambah dari pemegang saham sehingga aset tumbuh agresif.

Sebetulnya, pencapaian nilai aset Bank Sumsel Babel itu sudah melampaui dari target yang

ditetapkan perusahaan hingga akhir tahun yakni Rp20 triliun.

“Akan tetapi per Juni 2017 nilainya sudah Rp22 triliun. Kami ingin pada akhir tahun nanti Rp21 triliun, agar level pertumbuhannya tetap bisa kami pelihara baik. Sementara tahun lalu aset kami mencapai Rp19 triliun,” katanya.

Transformasi Menuai Prestasi

Pada usia ke-60 tahun, Bank Sumsel Babel juga kembali mengukir beragam prestasi maupun apresiasi atas performa dalam menjalankan roda bisnis perbankan.

Satu per satu penghargaan diterima Bank Sumsel Babel sepanjang tahun ini mulai dari aspek kinerja, layanan, hingga olahraga dan seni. Salah satu yang paling bergengsi tentu saja pengakuan dalam acara *Bank Service Excellence Award*.

Penobatan ini merupakan hasil survei Bank Service Excellence monitor (BSEM) 2017 yang dilakukan Marketing Research Indonesia (MRI) bekerja sama dengan Info Bank untuk kategori Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan penilaian layanan *walk in channel* atau kantor cabang dengan total skor 74,24 atau naik 7,17 poin dibandingkan pada 2016.

Dari enam kategori yang disurvei, Bank Sumsel Babel meraih peringkat terbaik ke-1 ATM serta satpam, terbaik ke-2 untuk kategori *costumer service*, terbaik ke-3 *teller* dan fisik *banking hall*,

serta terbaik ke-4 untuk kategori layanan telepon.

Saat ini Bank Sumsel Babel memiliki jaringan sebanyak 24 kantor cabang, 45 kantor cabang pembantu, 95 kantor kas, serta 45 *payment point*. Adapun jumlah mesin ATM yang tersebar di provinsi Sumsel maupun Babel telah mencapai 309 unit.

Selain itu, Bank Sumsel Babel kembali meraih tiga penghargaan pada TOP BUMD yakni, kategori Top CEO bidang Management Inovasi, Top BUMD Best Over All Criteria, dan Top BPD Buku II yang dilaksanakan oleh Majalah *Business News Indonesia*.

Bank Sumsel Babel mempersembahkan prestasi terbaiknya pada salah satu ajang bertaraf nasional yang berdasarkan hasil evaluasi kinerja 2016/2017, di mana penghargaan ini yang kedua kali pada 2016 dan 2017.

Tak hanya diapresiasi atas kinerja dan layanannya, Bank Sumsel Babel kembali mengukir prestasi dalam Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) BPD SI XII dengan menyabet gelar sebagai juara umum. Perusahaan berpartisipasi di 11 cabang olahraga dan delapan cabang seni.

“Dengan kekuatan 118 atlet eksekutif dan berprestasi, perjuangan tanpa lelah pegawai BSB mengikuti pertandingan dan lomba selama empat hari itu sangat baik.”

Gelar juara umum diperoleh Bank Sumsel Babel setelah berhasil mengumpulkan delapan emas, sembilan perak, dan 10 perunggu dalam *event* yang berlangsung di Bandung tersebut.

Dengan menjadi jawara pada PORSENI BPD SI XII, menjadikan Bank Sumsel Babel sebagai juara umum tiga kali berturut-turut. Di mana sebelumnya Bank Sumsel Babel juga keluar sebagai juara umum PORSENI BPD SI tahun 2013 di Palembang dan PORSENI BPD SI tahun 2015 di Yogyakarta.



Selanjutnya yang paling bergengsi yakni juara pertama dalam penganugerahan Annual Report Award (ARA) 2017 untuk kategori BUMD *non-listed*. Itu merupakan kali ketiga Bank Sumsel Babel meraih penghargaan serupa pascatransformasi yang dilakukan perusahaan sejak 2014.

Memperkuat Digital Banking

Seiring perkembangan zaman di mana layanan digital sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, Bank Sumsel Babel pun tak

mau ketinggalan untuk bersaing di dunia perbankan yang telah berbalut digital.

Adil mengatakan saat ini *digital banking* sudah menjadi orientasi perusahaan. Oleh karena itu, pihaknya sudah jauh-jauh hari menyiapkan produk layanan digital yang bisa dinikmati nasabah.

“Kami sudah lengkap, *Internet banking, mobile banking, e-money BSB Cash*, serta layanan Laku Pandai sudah ada. Saya berani jamin, satu-satunya BPD yang pakai *e-money* baru Bank Sumsel Babel, yang lain baru mau mengusulkan,” ujarnya.

Bagi perusahaan, investasi di layanan digital memang tidak murah dan belum menguntungkan. Contohnya uang elektronik. “Jujur *e-money* itu tidak menguntungkan, tetapi ada gengsinya. Tidak untung karena tidak dihitung sebagai *funding*, tetapi layanan,” katanya.

Namun demikian, pihaknya ingin menjaga agar nasabah tidak berpaling karena layanan yang belum lengkap. “Kalau nasabah tidak punya *e-money*, tetapi punya tabungan jangan-jangan dia pindah ke bank lain yang punya *e-money*. Ini yang ditakutkan, karena mereka cari kemudahan. Kalau tidak punya *e-money*, tidak punya *Internet banking*, tetapi bank lain punya semua, ya wasalam.” **(Dinda/ Finansial)**

Annual Report Award Bank Sumsel Babel Cetak *Hattrick*

Laporan tahunan sebuah perusahaan saat ini tidak hanya menjadi lembaran yang disajikan di meja RUPS, melainkan telah menjelma sebagai media efektif untuk menunjukkan kinerja dan arah perusahaan di masa depan.

Menyadari pentingnya serta manfaat laporan tahunan itu, maka perusahaan terus memacu penyusunan laporan secara baik, informatif serta tetap menganut ketentuan perundangan yang berlaku. Langkah itu pun terus

dilakukan Bank Sumsel Babel.

Apalagi, jika laporan tahunan itu mendapat penilaian yang baik dari berbagai pihak, tentu menjadi prestasi yang patut dibanggakan.

Transformasi yang dilakukan Bank Sumsel Babel kembali menuai hasil positif.



Bank Pembangunan Daerah (BPD) kebanggaan masyarakat Sumsel dan Babel itu diganjar berbagai penghargaan mulai dari aspek kinerja, layanan, hingga olahraga dan seni.

Direktur Utama Bank Sumsel Babel M. Adil mengatakan, sebagian gelar juara yang disabet pihaknya bukanlah kali pertama. Ada gelar yang berhasil dipertahankan tahun ini. Salah satunya menjadi jawara dalam Annual Report Award (ARA) 2016.

Ada pula gelar jawara yang baru pertama kali diraih perusahaan, seperti penghargaan The Best BPD Service Excellence 2017.

“Alhamdulillah, transformasi yang telah kami lakukan membuahkan hasil baik dari kinerja maupun layanan. Kalau kita mau, kita pasti bisa,” katanya.

Bagi Adil, banjirnya prestasi yang didapat Bank Sumsel Babel kali ini menjadi tantangan tersendiri buat perusahaan untuk mempertahankan gelar jawara tersebut. Oleh karena itu, pihaknya *concern* menjadikan perbaikan kinerja maupun layanan sebagai budaya di tubuh perusahaan.

“Tidak mudah untuk unggul di berbagai bidang, namun Bank Sumsel Babel dapat menunjukkan bahwa kami bisa.”

Penghargaan dalam ajang bergengsi kembali diraih Bank Sumsel Babel. Ini merupakan kali ketiga Bank Sumsel Babel meraih penghargaan serupa pasca

“Ini menjadi kebanggaan manajemen dan pegawai BSB. Terima kasih kepada pegawai yang terus konsisten melaksanakan GCG, terus berbenah untuk menjadi perusahaan yang lebih baik.”

transformasi yang dilakukan perusahaan sejak 2014 lalu.

Bank kebanggaan milik masyarakat Sumsel dan Babel ini menorehkan prestasi yang baik pada penghargaan Annual Report Award yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 19 september 2017.

Acara penganugerahan ini diselenggarakan dengan tujuan mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip *good corporate governance* (GCG) melalui keterbukaan informasi dan praktik GCG.

KRITERIA PENILAIAN

Penilaian ARA untuk tahun buku 2016 terdiri dari delapan kriteria kualitas informasi dalam laporan tahunan, khususnya menyangkut aspek transparansi dan GCG.

Bobot masing-masing yakni umum 2%, ikhtisar data keuangan penting 5%, laporan dewan

komisaris dan direksi 3%, profil perusahaan 8%, serta analisa dan pembahasan manajemen atas kinerja 22%. Adapun, penilaian GCG 35%, informasi keuangan 20%, dan lainnya 5%.

“Ini menjadi kebanggaan manajemen dan pegawai BSB. Terima kasih kepada pegawai yang terus konsisten melaksanakan GCG, terus berbenah untuk menjadi perusahaan yang lebih baik.”

Seperti dilansir dari situs resmi *annualreport.id*, prinsip GCG yang berhasil dipenuhi Bank Sumsel Babel meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan.

Transparansi diperlukan untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan secara tepat waktu, dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, tidak hanya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, namun hal penting dalam pengambilan keputusan pemegang saham, dan pemangku kepentingan lain.

Sementara terkait dengan akuntabilitas, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perlu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban setiap organ perusahaan.



Poin GCG terkait responsibilitas di mana perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan untuk menjaga kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

Penilaian GCG juga menyangkut independensi di mana prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak lain.

Prinsip terakhir dalam GCG yakni kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara umum, penilaian ARA berdasarkan pada empat kriteria. *Pertama*, gambaran yang baik di mana perusahaan

bisa memberikan gambaran yang baik dan jelas mengenai kegiatan operasional perusahaan dan penjelasan mengenai kinerja perusahaan, serta indikasi arah perusahaan di masa yang akan datang.

Kedua, informasi yang jelas menyangkut penerapan GCG.

Ketiga, penyajian informasi keuangan yang baik dan informatif sesuai dengan ketentuan asuransi yang berlaku di Indonesia.

Dan *keempat*, penilaian terkait kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Annual Report Award merupakan kompetisi tahunan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, bekerja sama dengan Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), dan Ikatan Akuntan Indonesia.

Tujuan diadakan ARA adalah untuk meningkatkan kualitas informasi dan *governance* melalui *annual report* atau buku laporan tahunan sebuah perusahaan. Sejak diselenggarakannya ARA pada 2002 hingga kini, terjadi sebuah peningkatan kualitas informasi pada laporan keuangan setiap tahunnya.

Pada ARA tahun ini, Panitia mengambil tema “Kualitas Keterbukaan Informasi untuk Mendukung Kinerja Perusahaan Secara Berkelanjutan dalam Memenangkan Persaingan Global”.

Ada beberapa perubahan dalam kriteria penilaian ARA tahun ini, salah satunya adalah perihal penjelasan tentang upaya perusahaan dalam melakukan komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur antikorupsi, serta pelatihan mengenai antikorupsi, dan lain-lain. **(Dinda/Finansial)**

RUPS LUAR BIASA BSB

M. Adil Lanjutkan Kepemimpinan

Pemegang saham Bank Sumsel Babel kembali mempercayakan Muhammad Adil untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai direktur utama BPD tersebut untuk periode kedua hingga empat tahun mendatang.

Keputusan itu diambil saat rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS LB) Bank Sumsel Babel yang berlangsung pada Rabu (20/12/2017). Diketahui, masa jabatan dirut yang diemban Adil pada periode pertama habis pada 23 Desember 2017.

Selain memutuskan Adil tetap menahkodai perusahaan, RUPS LB juga digelar untuk mengisi kekosongan sejumlah jajaran direksi.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan pemegang saham menetapkan calon pengurus bank sesuai aturan yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan maupun diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

“Dengan pengurus yang baru nantinya siap untuk bersaing dengan perbankan nasional dan siap dalam menghadapi era persaingan *fintech*,” katanya.

Dia menambahkan, dalam pengelolaan bank ada beberapa hal yang menjadi faktor penentu dalam menjalankan usaha di antaranya, permodalan, manajemen yang profesional, sumber daya



manusia, teknologi, serta sistem informasi dan kualitas layanan.

Alex juga berharap nantinya pengurus yang baru harus dapat mencari solusi untuk memperkuat modal. “Sebagai *stakeholders* seluruh pemegang saham berkomitmen untuk menyetorkan modal saham agar Bank Sumsel Babel lebih cepat berkembang,” ujarnya.

Menurutnya, direksi Bank Sumsel Babel harus dapat menggali sektor unggulan dan bisa berdaya saing dengan bank pesaing, memaksimalkan pembiayaan UMKM dan penyaluran KUR dengan tetap *prudent* dan memperbaiki rasio *non performing loan* (NPL).

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa tersebut mengingat telah memasuki habis masa jabatan Direktur Kepatuhan, para pemegang saham sepakat memberhentikan dengan hormat Rozi A. Sabil dari posisi sebagai Direktur Kepatuhan Bank Sumsel

Babel dan apabila disetujui segera untuk mencari penggantinya.

Pada hasil RUPS tersebut para pemegang saham juga sepakat untuk posisi direktur operasional Bank Sumsel Babel ada dua calon yang diusulkan yakni Rendra dan Mulyadi Mustofa.

Kedua calon direksi itu merupakan mantan pegawai Bank Sumsel Babel, sedangkan untuk posisi komisaris independen, Guru Besar Teori Sosiologi Universitas Bangka Belitung Bustomi Rahman menjadi satu-satunya calon yang diusulkan pemegang saham pada RUPS tersebut.

Sekretaris Perusahaan Bank Sumsel Babel Faisol Sinin mengatakan keputusan untuk menetapkan calon pengurus bank akan segera diusulkan kepada OJK untuk dilakukan *fit and proper test*. “Harapannya direksi baru akan membuat Bank Sumsel Babel lebih baik lagi,” ujarnya. (*)



Menyisir Peluang Diversifikasi

Permintaan kredit perbankan hingga akhir 2017 diperkirakan tertahan untuk sejumlah sektor namun celah industri untuk menangkap peluang di sektor lain masih terbuka.

Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatra Selatan memproyeksi pertumbuhan kredit perbankan hingga akhir tahun masih di bawah 10%.

“Proyeksinya di bawah 10%, mungkin pertumbuhan pembiayaan bisa menyentuh 9% hingga akhir tahun ini,” kata Asisten Direktur Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumsel Irfan Farulian.

Dia mengatakan, perbankan saat ini masih dalam tahap

konsolidasi untuk melihat sektor mana saja yang dianggap masih berisiko.

Menurut Irfan, sektor usaha yang paling mudah dalam menyerap permintaan kredit ke perbankan adalah perdagangan besar dan eceran. Apalagi, di akhir tahun kegiatan perdagangan akan didukung momen seperti Natal dan Tahun Baru.

Selain itu, dia melanjutkan, sektor pariwisata merupakan salah satu potensi yang bisa dibidik industri perbankan di Sumsel.

Pasalnya, pariwisata di Sumsel cukup menggeliat belakangan ini. Hal itu tercermin dari kredit sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya yang mencapai Rp930,10 miliar per Agustus 2017 atau tumbuh 35,16% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Sementara untuk sektor perdagangan besar dan eceran tercatat tumbuh 8,10% pada Agustus 2017 yakni mencapai Rp16,23 triliun.

Irfan melanjutkan penyaluran kredit ke sektor perkebunan, seperti sawit dan karet masih berisiko mengingat belum stabilnya perkembangan harga komoditas itu.

“Sementara untuk sektor pertambangan dengan harga batu bara yang stabil dan cenderung menguat masih prospektif bagi perbankan,” ujarnya.

Jika ditelaah lebih lanjut, sepanjang paruh pertama tahun ini, penyaluran kredit di Sumsel sebetulnya mengalami perlambatan.

Dalam Kajian Ekonomi Regional (KER) Sumsel yang disusun bank sentral, kinerja penyaluran kredit pada triwulan II/2017 melambat 9,04% (yoy)

menjadi Rp108,36 triliun. Bahkan pertumbuhan kredit di triwulan ini masih lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan kredit triwulan II selama empat tahun terakhir yang mencapai 14,30%.

Menurut jenis penggunaannya, terjadi penurunan signifikan terhadap pertumbuhan porsi kredit modal kerja.

Kredit modal kerja pada triwulan II/2017 tumbuh melambat sebesar 9,02% (yoy) dengan nilai Rp41,3 triliun. Sementara tahun lalu kredit sektor itu tumbuh hingga 20,98% atau sebesar Rp41,9 triliun.

Kondisi yang sama juga terjadi pada kredit konsumsi yang pertumbuhannya melambat menjadi 9,54% dengan nilai Rp30,88 triliun dari 9,68% sebesar Rp30,13 triliun. Namun demikian, kredit investasi mengalami peningkatan pertumbuhan hingga 8,63%.



BI menilai menurunnya kredit modal kerja diperkirakan karena meningkatnya kegiatan ekspor perkebunan karet di Sumsel, sehingga pendapatan dan laba yang dihasilkan dapat digunakan kembali sebagai modal kerja.

Hal ini juga sejalan dengan kredit investasi yang ikut meningkat khususnya untuk kegiatan ekspansi dan proses penanaman bibit pohon karet.

Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sumsel Rudy Hairudin mengatakan perlambatan kredit triwulan II berasal dari sektor seperti industri pengolahan, konstruksi, sektor penyediaan akomodasi makan dan minum, serta pertambangan dan penggalan.

“Sedangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan peningkatan kredit,” kata Rudy dalam KER Sumsel triwulan II/2017.

SEKTOR UMKM

Asisten Direktur Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumsel Irfan Farulian mengatakan sektor UMKM masih potensial untuk digarap perbankan hingga akhir tahun ini.

“UMKM itu kan sektor informal yang tahan dengan kondisi apapun, termasuk saat ekonomi



sedang sulit,” katanya.

Berdasarkan catatan bank sentral, Sumsel memiliki hampir 2,1 juta izin UMKM yang terdaftar dan hampir 60% pangsa industrinya didominasi oleh usaha pertanian dan perkebunan.

Sementara penyaluran kredit UMKM terutama kepada sektor perdagangan besar dan eceran dengan pangsa pasar 46,3%.

“Oleh karena itu, Bank Indonesia menyadari perlunya mendukung kegiatan UMKM sebagai salah satu cara membangun ekonomi Indonesia,” katanya.

Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan perbankan menyalurkan kredit kepada UMKM minimal sebesar 20% yang dilakukan secara bertahap.

Kebijakan ini juga diperkuat dengan kebijakan pelonggaran *loan to funding ratio* (LFR) menjadi 94% per 1 Agustus 2015 bagi bank yang telah memenuhi pencapaian tertentu kredit UMKM dengan kualitas baik. **(Dinda/Finansial)**

EKONOMI SUMSEL 2018

Bakal Kian Menggeliat

Perekonomian Sumatra Selatan diperkirakan akan bergerak dinamis pada tahun depan seiring digelarnya *event* olahraga terbesar di Benua Asia, yakni Asian Games di Kota Palembang. Selain itu, momen pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) juga diyakini makin membuat geliat perekonomian di Bumi Sriwijaya makin lincah.

Ekonom Universitas Sriwijaya Bernadette Robiani mengatakan, perhelatan Asian Games akan memberi efek ganda (*multiplier effect*) bagi roda perekonomian Sumsel. Semua sektor usaha dinilai akan tumbuh positif, mulai dari sektor perdagangan, pariwisata, hotel dan restoran hingga sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Tahun depan ekonomi Sumsel akan sangat dinamis. Tantangannya bagaimana swasta dan pemerintah harus bisa menangkap peluang itu karena ada Asian Games dan Pilkada, akan sangat luar biasa,” katanya.

Oleh karena itu, guru besar Fakultas Ekonomi Unsri tersebut memerkirakan ekonomi

Sumsel dapat tumbuh di kisaran 5,3% pada tahun depan. Angka itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Sumsel 2017 yang mencapai 5,2%.

Salah satu dampak yang



dirasakan masyarakat Sumsel terkait persiapan Asian Games adalah maraknya pembangunan infrastruktur di Palembang. Deru pembangunan itu pun terlihat di sepanjang jalan Kota Palembang, sebut saja satu proyek moda transportasi bergengsi yakni jalur kereta api ringan (*light rail transit*) yang melintasi jalan-jalan utama Palembang sepanjang 23 kilometer.

Ada pula pembangunan Jembatan Musi IV yang menghubungkan Kawasan 14 Ulu dan 3 Ilir, di mana nantinya jembatan itu diharapkan dapat mengurai kepadatan lalu lintas di Jembatan Ampera. Selain itu masih ada pembangunan *fly over* Simpang Bandara dan proyek jalan

tol Palembang—Indralaya (Palindra).

Semua proyek infrastruktur tersebut telah dimulai sejak dua tahun lalu dan terus dikebut pengerjaannya supaya dapat rampung sebelum Asian Games yang akan berlangsung pada Agustus 2018. Adapun nilai sejumlah proyek infrastruktur pendukung Asian Games itu tercatat mencapai Rp86 triliun.

Sebagai catatan, bukan kali ini saja Sumsel ditunjuk sebagai tuan rumah ajang kompetisi olahraga skala internasional maupun nasional. Pemerintah provinsi mencatat tak kurang sudah 38 *event* olahraga yang berlangsung di Palembang sejak beberapa tahun terakhir.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan proyek infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, *fly over* maupun moda transportasi

LRT bakal mendukung akses yang memudahkan masyarakat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Alex mengatakan, pemprov selama ini terus memaparkan perkembangan dan potensi investasi pada pembangunan infrastruktur Asian Games 2018 ke berbagai tempat. Karena tanpa kenal dengan Sumsel, mustahil investasi akan bisa masuk.

“Makanya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu saya promosikan terus daerah ini. Dan saya memilih sektor olahraga. Sekarang lihat sendiri, dengan Jakabaring, nama Sumsel makin dikenal dunia,” ujarnya.

Alex mengemukakan hanya dengan APBD Rp8 triliun lebih Sumsel kini bisa memiliki infrastruktur dengan nilai mencapai Rp86 triliun. “Semua itu karena apa? Karena Sumsel punya





Salah satu dampak yang dirasakan masyarakat Sumsel terkait persiapan Asian Games adalah maraknya pembangunan infrastruktur di Palembang. Deru pembangunan itu pun terlihat di sepanjang jalan Kota Palembang, sebut saja satu proyek moda transportasi bergengsi yakni jalur kereta api ringan (*light rail transit*) yang melintasi jalan–jalan utama Palembang sepanjang 23 kilometer.

semangat dan motivasi yang kuat,” jelasnya.

Dari catatan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumsel, terdapat 13 proyek strategis nasional di Sumsel yang telah ditetapkan pada 2016. Adapun sebanyak tujuh proyek sedang berada dalam tahap pembangunan tahun ini.

Bank sentral juga mencatat investasi swasta, terutama pada penyediaan akomodasi, makan dan minum menjelang Asian Games 2018 turut mendorong peningkatan PDRB komponen investasi.

Selain itu, Bank Indonesia Perwakilan Sumsel menilai

pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan masih menjadi sumber pertumbuhan utama pada beberapa periode ke depan.

“Perekonomian Sumsel ke depan masih didorong oleh pembangunan infrastruktur, namun perbaikan harga komoditas tidak akan setinggi di triwulan I dan II 2017,” kata Kepala Perwakilan BI Sumsel Rudy Hairudin dalam kajian ekonomi regional (KER) triwulan II/2017.

KONSISTENSI PEMBANGUNAN

Pesta olahraga skala internasional sudah pernah



memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumsel. Tepatnya saat Palembang menjadi tuan rumah SEA Games 2011.

Kepala Seksi Analisis Statistik Lintas Sektoral BPS Sumsel Dedi Fahlevi mengatakan, dalam periode 2010—2014 di tengah tekanan perekonomian global yang masih berat dan belum stabil khususnya kondisi harga beberapa komoditi ekspor unggulan Sumatra Selatan seperti kelapa sawit, karet, dan batu bara, kondisi perekonomian Sumatera Selatan tumbuh cukup baik.

Jika menengok data BPS, pertumbuhan ekonomi Sumsel pada 2011 silam menyentuh 6,5% atau naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar

5,63%. Namun demikian, angka pertumbuhan itu kembali turun pada tahun berikutnya setelah SEA Games usai, yakni menjadi 6,01% pada 2012.

“Untuk menjaga konsistensi pembangunan dalam jangka panjang, memang harus diakui bahwa penyelenggaraan *event* besar sangat dibutuhkan sebagai sarana *marketing* produk maupun investasi,” katanya.

Oleh karena itu, pengamat ekonomi Bernadette Robiani mengingatkan pemda perlu menjaga pertumbuhan ekonomi setelah pesta usai.

“Kalau kita baca beberapa tulisan, sesudahnya memang tidak sama seperti persiapan dan pelaksanaan. Akan tetapi, beberapa negara seperti Jerman

bisa membuat arena Olimpiade menjadi objek kunjungan turis, seharusnya Sumsel juga bisa,” paparnya.

Bernadette mengatakan pemda bisa memanfaatkan kompleks JSC menjadi destinasi wisata berkonsep *sport tourism*. Meskipun, dia mengaku, tentu pemerintah perlu merogoh kocek untuk mengenalkan wisata olahraga tersebut ke wisatawan.

Di samping itu, pemerintah juga perlu mempertahankan arus investasi masuk ke Sumsel pada tahun depan. “Faktor yang menentukan terkait regulasi, apakah swasta kalau mau investasi bisa dipermudah? Budaya kita juga harus mendukung, aspek sosial perlu diperhatikan, investor harus merasa *secure*.” **(Dinda/Finansial)**

Investasi SDM, Modal Ekonomi Berkelanjutan

Hampir sebagian besar pembuat kebijakan—terutama di negara berkembang—akan menyebut infrastruktur sebagai prioritas teratas sebagai penggerak ekonomi. Tidak mengherankan jika Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mulai gencar melakukan pembangunan infrastruktur selama 3 tahun ini.

Lihat saja, pascaperubahan skema subsidi energi, anggaran infrastruktur mengalami peningkatan signifikan. Selama 2010–2014, rerata persentase anggaran infrastruktur kurang dari 10% dari total belanja negara. Pada 2015, 2016, 2017, anggaran tersebut naik masing-masing hingga 14,2%, 15,2%, dan 18,6% terhadap total belanja negara.

Tidak ada yang salah dalam pilihan ini karena ketertinggalan—yang berimplikasi pada konektivitas—harus dikejar. Namun, guyuran investasi dalam infrastruktur harus secara paralel diikuti dengan pembangunan manusia. Sumber daya manusia (SDM)

harus diletakkan sebagai modal untuk menggerakkan ekonomi berkelanjutan.

Dalam gelaran Rapat Tahunan Bank Dunia-Dana Moneter Internasional (IMF) 2017 di Washington, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mulai menggaungkan hasil kajian awal institusinya bahwa ada cukup besar korelasi positif antara investasi di SDM (*human capital*) dan pertumbuhan ekonomi.

Fakta ini terlihat jika



membandingkan 25% negara teratas—yang telah meningkatkan pengembangan SDM—dengan 25% negara paling bawah. Dalam kurun 1991 hingga 2016, ada perbedaan yang cukup besar dari sisi laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) hingga 1,25% setiap tahunnya.

Kim mengaku masih perlu riset lebih mendalam. Beberapa ekonom Bank Dunia telah bekerja dengan sebuah kelompok dari University of Washington yang memiliki hubungan kemitraan dengan Gates Foundation. Bank Dunia, sambungnya, meminta penggunaan alat analisis yang kuat untuk melihat korelasi kedua indikator tersebut.

Tidak tanggung-tanggung, jelang rapat tahunan 2018 di Indonesia, institusinya akan bekerja sama dengan beberapa pakar ekonomi, kesehatan, dan pendidikan untuk mengembangkan *Human Capital Project*. Hal tersebut akan menjadi acuan tiap negara dalam mengembangkan SDM, layaknya kemudahan investasi dalam *Ease of Doing Business*.

Human Capital Project akan melibatkan tiga upaya, *pertama*, percepatan inovasi dan pendanaan berbasis hasil pada investasi pada manusia. *Kedua*, penggalan data yang menghubungkan investasi pada manusia dengan pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia akan mencari pola baru dan jawaban baru.

Ketiga, pembentukan koalisi yang luas dengan melibatkan seluruh *stakeholders*.

“Investasi pada manusia akan menjadi lebih penting dalam situasi peningkatan ekonomi digital dan teknologi. Beberapa penelitian mengestimasi ada sebanyak 65% anak sekolah dasar sekarang akan bekerja di lapangan pekerjaan yang belum ada saat ini.”

Melalui sistem peringkat, Bank Dunia mencoba untuk menciptakan kondisi yang ‘memaksa’ para pemangku kebijakan untuk berinvestasi dalam SDM. Kim sudah punya ekspektasi adanya kontroversi. Namun, dia menegaskan instansinya akan siap membantu setiap negara untuk mengakselerasi kualitas dan kuantitas investasi di SDM.

Selama ini yang muncul hanyalah argumentasi moral bahwa setiap orang berhak mendapatkan aspirasi tertinggi. Menyediakan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial merupakan salah satu cara paling ampuh untuk memberi kesempatan bagi setiap orang. Padahal, ini bukan sekadar argumentasi moral.

“Berinvestasi di masyarakat tidak hanya hal moral yang bisa dilakukan, tetapi ini sebenarnya sesuatu yang harus dilakukan

dengan sangat mendesak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Dalam konteks Indonesia, Jim menilai penyediaan mandatory spending untuk kesehatan 5% dan pendidikan 20% dari APBN sudah menunjukkan arah yang tepat. Namun demikian, pihaknya meminta agar pemerintah mulai melihat kondisi dunia beserta pengalaman yang ada untuk menentukan implementasi kebijakan agar efektif dan tepat sasaran.

Pihaknya juga menyoroti masih adanya fenomena *stunting*, yaitu suatu kondisi di mana seorang anak memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Menilik data Kementerian Kesehatan pada 2016, masih ada sekitar 27,5% balita *stunting* di Tanah Air. Walaupun demikian, angka tersebut sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi pada 2015 sebesar 29,0%.

Menurut Kim, Hal ini perlu diwaspadai dan dimitigasi segera. Kondisi kekurangan nutrisi dan gizi ini berisiko membuat tenaga kerja Indonesia sulit bersaing di masa depan. Terlebih, adanya perkembangan teknologi yang cukup dinamis memaksa setiap SDM setiap negara harus lebih kompetitif.

“Investasi pada manusia akan menjadi lebih penting dalam situasi peningkatan ekonomi digital dan teknologi. Beberapa penelitian mengestimasi ada sebanyak 65% anak sekolah dasar sekarang akan

bekerja di lapangan pekerjaan yang belum ada saat ini,” jelasnya.

BONUS DEMOGRAFI

Hal ini memang perlu dicermati mengingat Indonesia akan mendapatkan jendela kesempatan dengan adanya bonus demografi pada 2020-2030. Bonus demografi ini ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk usia kerja. Pasalnya, porsi penduduk produktif antara 15-64 tahun pada rentang waktu itu akan mencapai 70% dari total populasi.

Changyong Rhee, Direktur Departemen Asia and Pacific IMF mengatakan untuk banyak negara Asia, isu paling penting memang menghindari jebakan pendapatan menengah (*middle-income trap*). Hal ini, menurutnya, bisa dilakukan dengan berinvestasi lebih banyak pada manusia serta reformasi pasar tenaga kerja karena adanya tren otomatisasi.

Jika menilik data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2017, jumlah penduduk bekerja yang berasal dari tamatan pendidikan rendah masih mendominasi, yakni sebanyak 60,39%. Sisanya, yakni 27,35% merupakan tamatan pendidikan menengah dan 12,26% tamatan pendidikan tinggi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada dasarnya investasi dalam SDM, terutama melalui pendidikan dan kesehatan, bukan hanya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga inklusivitas. Hal ini memberikan

“Menilik data Kementerian Tenaga Kerja, sampai saat ini terdapat 308 industri/ perusahaan yang membina 1.035 sekolah menengah kejuruan. Selain itu, pemerintah menargetkan tercapainya 1 juta tenaga industri yang tersertifikasi kompetensinya.”

kesempatan akses yang sama terhadap sumber-sumber perekonomian di Tanah Air.

Indonesia telah berkomitmen dengan adanya *mandatory spending* untuk kesehatan dan pendidikan. Namun demikian, pihaknya mengakui tantangan memang ada pada pemanfaatan dana tersebut melalui berbagai pilihan kebijakan. Penjagaan anggaran yang efektif dan akuntabel pun menjadi salah satu aspek yang akan terus dilakukan.

Terkait dengan kualitas tenaga kerja, saat ini pemerintah juga telah mengencangkan program vokasi. Menilik data Kementerian Tenaga Kerja, sampai saat ini terdapat 308 industri/ perusahaan yang membina 1.035 sekolah menengah kejuruan. Selain itu, pemerintah menargetkan tercapainya 1 juta tenaga industri yang tersertifikasi kompetensinya.

Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (Core) M. Faisal berpendapat tahap integrasi pada implementasi dari

alokasi anggaran memang krusial bagi Indonesia. Khusus untuk jangka pendek, pendidikan vokasi memang langkah yang tepat, mengingat tingkat pengangguran di Indonesia yang masih di atas 5%.

Namun, pihaknya meminta pemerintah agar membuat kebijakan agar ada transfer teknologi, terutama saat ada investasi asing yang masuk. Hal ini memungkinkan agar Indonesia dapat dengan cepat melakukan percepatan pembangunan lanjutan dengan teknologi yang serupa di masa mendatang. Pada saat bersamaan, percepatan sertifikasi juga harus dilakukan.

Dalam konteks menghadapi perkembangan teknologi, pemerintah juga perlu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penciptaan inovasi, ketika anggaran penelitian dari APBN hanya sekitar 0,1% dari PDB.

Besaran tersebut jelas lebih rendah dibandingkan Malaysia, China, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat yang masing-masing mencapai 1,25%, 2%, dan 2,2%, 3,6%, 4%, dan 2,75% dari PDB.

Jadi, peningkatan kualitas SDM seharusnya tidak sekadar dijadikan bumbu dalam setiap pertimbangan pembuatan keputusan. Komitmen yang sudah dicanangkan pun butuh upaya realisasi yang kuat. Jangan sampai bonus demografi lewat begitu saja—bahkan menciptakan beban—karena negara tidak melihat pentingnya realisasi prioritas ini. **(Surya/Finansial)**

Kendati akselerasi kinerja perbankan pada 2017 belum secepat harapan semula, banyak pihak yang meyakini Tahun Anjing Bumi 2018 akan membawa perubahan yang positif.

Gairah Menyala di Tahun Anjing Bumi

Semula, pertumbuhan kinerja perbankan diharapkan akan pulih pada tahun lalu dan pertumbuhan kredit diproyeksikan dapat tembus 13%. Akan tetapi, faktanya, konsolidasi korporasi dan perbankan sendiri masih terus berlanjut sehingga membuat kinerja tidak sesuai harapan.

Dalam perjalanan waktu, target kredit beberapa kali mengalami revisi. Medio 2017, perbankan melakukan revisi target akhir tahun menjadi 11%.

Akan tetapi, hingga akhir kuartal III/2017, pertumbuhan kredit secara tahunan masih rendah yakni di level 7,86%, tercatat

melambat dibandingkan dengan realisasi Agustus 8,26%. Di sisi lain, rasio kredit bermasalah (*nonperforming loan/NPL*) turun tipis dari 3,05% pada Agustus menjadi 2,93% pada akhir September 2017.

Walau realisasinya belum sesuai harapan, kalangan bankir tak kehilangan optimisme. Malahan ekspektasi yang belum terpenuhi tahun lalu diharapkan dapat terwujud pada tahun ini. Penyaluran kredit perbankan pada tahun depan diperkirakan akan lebih positif dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun ini.



Sejumlah banker optimistis mematok target pertumbuhan bisnis tahun 2018. Kenaikan kredit diyakini akan di atas target tahun lalu yang ada di level 9%-11%.

Keyakinan tersebut didasarkan pada kondisi tekanan eksternal yang diprediksi tidak terlalu mengkhawatirkan. Di sisi lain, potensi perbaikan tersebut juga dimungkinkan bila The Fed lebih lunak dengan tidak menaikkan suku bunga, serta inflasi dalam negeri dapat terus terjaga.

Prospek dan tantangan bagi industri perbankan sangat dipengaruhi perkembangan sektor riil, baik nasional maupun global. Pertumbuhan kredit 2017 relatif rendah karena permintaan kredit dari sektor riil yang rendah. Hal itu disebabkan permintaan barang dan jasa yang juga rendah karena memang secara keseluruhan kondisi sektor riil dunia lemah pada 2017.

Akan tetapi, optimisme terhadap pertumbuhan bank akan membaik seiring dengan prediksi sektor riil global yang mulai menggeliat serta keyakinan akan pulihnya sektor riil dalam negeri tetap saja menyala. Sejalan dengan itu, tingkat kredit bermasalah juga diharapkan lebih rendah.

Di sisi lain, pada tahun depan kondisi likuiditas perbankan akan sangat dipengaruhi kebijakan bank sentral Amerika Serikat. Hal itu bakal berpengaruh terhadap gairah bank dalam menyalurkan kredit.

Beberapa negara maju seperti Uni Eropa dan Jepang juga diperkirakan

“Pertumbuhan kredit tahun ini saya perkirakan antara 8%–9%, tahun depan (2018) bisa ke 10%–12%. Hasil akhirnya nanti ditentukan di sisi *demand* apakah permintaan debitur memang akan menguat serta di sisi *supply* apakah *risk appetite* kredit bank–bank memang meningkat.”

mulai mengurangi kebijakan stimulus ekonominya. Belum lagi secara umum para bank sentral di negara maju kemungkinan mulai melakukan normalisasi kebijakan moneter mereka.

Situasi itu berpotensi memicu dana yang saat ini ada di negara-negara berkembang berpotensi mengalami *capital outflow*. Seiring kemungkinan ini, diperkirakan tantangan likuiditas bagi bank akan menjadi cukup ketat.

PROYEKSI OJK

Sementara itu, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyatakan penyaluran kredit dan dana pihak ketiga perbankan nasional pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 10%-12%.

“Tahun depan [penyaluran kredit] lebih bagus dari 2017. Karena ekonomi dunia membaik dan ini pasti ada implikasi positif ke ekspor kita yang banyak berbentuk komoditas,” katanya.

Dia juga menyinggung mengenai potensi perbaikan perekonomian China yang akan berdampak positif ke dunia usaha,

termasuk di Tanah Air. Dua faktor itu diperkirakan akan mendorong pertumbuhan kredit menjadi lebih baik terutama kredit komersial.

Di sisi lain, OJK menyatakan ada empat faktor yang menjadi tantangan pengembangan ekonomi dan industri jasa keuangan di tahun depan.

Pertama, menyangkut ketidakpastian kebijakan ekonomi dan politik global yang terpantau tinggi sejak akhir 2017, seperti situasi politik di Spanyol dan situasi geopolitik di Semenanjung Korea serta pemutusan hubungan politik di semenanjung Arab dengan Qatar. Kondisi ini berpotensi mempersempit ruang kebijakan yang dapat diambil.

Kedua, faktor normalisasi kebijakan moneter negara maju yang berpotensi memicu *capital outflow* di negara berkembang termasuk Indonesia. *Ketiga*, terkait dengan perkembangan *financial technology*, *e-commerce*, dan *cyber crime*. *Keempat*, pada 2018 sebagai tahun yang penuh dinamika politik.

Wimboh melanjutkan, dilihat dari likuiditas dan permodalan, pada 2018 industri jasa keuangan



masih memiliki kemampuan penyaluran kredit untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari target pemerintah, yakni 5,4%.

Kepala Ekonom SKHA Institute for Global Competitiveness (SIGC) Eric Sugandi menilai kinerja perbankan akan membaik pada Tahun Anjing Bumi 2018 dibandingkan dengan tahun Ayam Api 2017.

Dia memperkirakan, kredit akan meningkat dari sisi permintaan karena pertumbuhan ekonomi 2018 yang diproyeksikan lebih tinggi. Adapun, dari sisi suplai diharapkan meningkat karena kebijakan pelonggaran moneter oleh Bank Indonesia, baik dengan pemotongan suku bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate dan

kebijakan makroprudensial, telah turunkan suku bunga kredit.

“Pertumbuhan kredit tahun ini saya perkirakan antara 8%-9%, tahun depan (2018) bisa ke 10%-12%. Hasil akhirnya nanti ditentukan di sisi *demand* apakah permintaan debitur memang akan menguat serta di sisi *supply* apakah *risk appetite* kredit bank-bank memang meningkat,” tutur Eric.

Terkait dengan risiko NPL, menurut Eric akan cenderung stabil atau sedikit turun karena bank-bank tidak terlalu gegabah salurkan kredit. Selain itu kondisi ekonomi yang membaik, salah satunya karena pemerintah berusaha memperbaiki daya beli masyarakat via program populis, juga akan bantu turunkan NPL

Dari sisi kemampuan bank dalam mencetak laba, diharapkan akan terus stabil dan berpotensi meningkat jika penurunan suku bunga kredit masih tidak secepat penurunan suku bunga simpanan.

“Laba dari *interest* bisa stabil atau sedikit naik kalau kondisi ekonomi membaik serta bila selisih *interest* dan *cost* tetap atau malah membesar.”

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja berpendapat, seharusnya pertumbuhan antara 9%-10% tetap mampu dilanjutkan pada 2018.

“Dalam keadaan ekonomi dunia lesu, kalau Indonesia sanggup tumbuh segitu [untuk kredit] sudah sangat bagus banget *lho*,” tuturnya. **(Surya/Finansial)**

Menunggu Rekor Baru di Tahun *Bullish*

Lincahnya pergerakan IHSG sepanjang 2017 yang mampu berkelit dari sejumlah sentimen negatif dan menembus rekor baru tertinggi sepanjang sejarah telah memupuk optimisme para pelaku pasar yang meyakini *bullish* akan berlanjut pada 2018.

Sejak akhir 2016 hingga awal 2017, optimisme tinggi telah ditanam oleh para pelaku pasar. Sejumlah analis pun memprediksi IHSG akan mencapai level 6.000 pada akhir 2017.

Namun, siapa sangka level psikologis tersebut mampu dicapai lebih cepat, yaitu pada pengujung Oktober 2017. Kuatnya fundamental perekonomian domestik yang berpadu dengan peringkat layak investasi yang disematkan S&P menjadi ramuan ajaib yang mengakselerasi indeks.

Sempat tertekan saat memanasnya kondisi geopolitik di Semenanjung Korea akibat provokasi Korea Utara, IHSG

kembali pada jalur positif dan terus bergerak naik.

Menariknya lagi, di tengah arus deras keluarnya dana asing yang melebihi Rp20 triliun hingga akhir Oktober 2017, IHSG terus bergerak menguat. Pelaku pasar dan otoritas Bursa Efek Indonesia pun memperkirakan hal tersebut disebabkan oleh kuatnya investor domestik.

Sejumlah fakta ini pun semakin menguatkan optimisme para pelaku pasar bahwa tren positif IHSG akan berlanjut pada 2018. Target IHSG pada 2018 berada dalam rentang 6.200 hingga 7.000.

Plt Research Head Bahana Sekuritas Henry Wibowo bahkan menargetkan IHSG pada pengujung 2018 bisa mencapai 7.000. "Target indeks pada akhir 2018 mencapai 7.000," ujarnya.

Bahana Sekuritas melihat salah satu faktor yang menjadi pendorong pemulihan daya beli masyarakat sepanjang 2018 yakni target inflasi yang lebih rendah dibandingkan sepanjang tahun ini.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, pemerintah menargetkan inflasi sebesar 3,5%. Hingga September 2017, inflasi tercatat sebesar 3,72% secara tahunan.



Selain itu, faktor harga komoditas yang konsisten menunjukkan kenaikan secara rata-rata semakin menguatkan rencana sejumlah perusahaan pertambangan untuk meningkatkan produksi dan ekspansi usaha pada tahun depan.

Analisis Bahana Michael Setjoadi mengungkapkan, kenaikan harga komoditas tersebut akan berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat setelah 1 tahun sejak awal peningkatan harga.

“Artinya kalau kenaikan harga komoditas sudah terjadi sepanjang tahun ini, maka dampaknya bagi konsumsi masyarakat akan terlihat pada 2018,” paparnya.

Dia menambahkan, pemerintah dalam RAPBN 2018 juga meningkatkan belanja subsidi, yang artinya hal ini diharapkan dapat mendongkrak daya beli masyarakat kelas bawah.

TAHUN POLITIK

Selain itu, faktor pemilihan daerah serentak serta kampanye pemilihan presiden yang bakal dimulai pada paruh kedua 2018, menjadi angin segar bagi sektor konsumsi.

“Perbaikan daya beli masyarakat hanya tertunda dari perkiraan paruh kedua tahun ini, bergeser ke tahun depan karena masih rendahnya belanja pemerintah hingga paruh pertama 2017.”

Apabila pemerintah menggenjot belanja pada paruh kedua 2017, dampaknya terhadap konsumsi

baru akan terlihat sepanjang paruh pertama 2018.

Hal senada diungkapkan Head of Intermediary Business Schroder Investment Management Indonesia Teddy Oetomo. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ditopang oleh daya beli masyarakat dan belanja pemerintah yang meningkat pada 2018.

Pihaknya memproyeksikan perekonomian Indonesia akan lebih baik walaupun sudah memasuki tahun politik karena meningkatnya perputaran uang pada saat kampanye Pilkada serentak di 17 provinsi.

Pasalnya, tiga lokasi Pilkada berada di wilayah strategis yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, atau setara dengan 40% populasi masyarakat Indonesia dan memengaruhi 30% ekonomi nasional.

Teddy mengungkapkan, daya beli masyarakat akan meningkat sejalan dengan banyaknya uang yang beredar jelang pemilihan umum. “Daya beli akan menguat karena peredaran uang akan meningkat, kampanye akan membuat perputaran uang lebih banyak dari tahun ini,” ujarnya.

Proyeksi tersebut, lanjutnya, mengacu siklus pada 2003, 2008, dan 2013. Berdasarkan data Schroder, pertumbuhan daya beli masyarakat rata-rata berada pada kisaran 5,5% sepanjang periode tersebut.

Adapun, belanja pemerintah mengalami pertumbuhan pada

tahun politik. Sebagai contoh, pertumbuhan belanja pemerintah mencapai 12,5% pada 2003. Sementara itu, pada 2008 meningkat sebesar 17,5% dan 2013 sebesar 5%.

“Tetapi berdasarkan data historis, ekspor memiliki kecenderungan mengalami penurunan. Kondisi tersebut akan mengalami perbaikan setelah pemilu,” ujarnya.

Analisis OSO Sekuritas Risiko Afriani menyoroti faktor keputusan The Fed untuk menaikkan suku bunga pada 2018. “Itu yang akan mempengaruhi investasi asing selain kondisi geopolitik,” ujarnya.

Head of Equity PT FAC Sekuritas Indonesia Amrin Tarigan mengatakan, pihaknya optimistis bahwa 2018 akan menjadi tahun yang lebih baik dibandingkan dengan 2017. IHSG, lanjutnya, berpotensi bergerak pada kisaran 6.200-7.000 pada 2018.

Meskipun bank sentral di negara lain berencana melakukan pengurangan pembelian obligasi di negara-negara berkembang, katanya, hal itu tidak akan berdampak signifikan pada Indonesia.

Amrin mengungkapkan, jumlah investor pasar modal Indonesia sekarang sudah lebih didominasi oleh investor lokal, yakni hingga 54%. Kampanye meningkatkan literasi pasar modal dinilai berhasil pada 2017.

Semakin membesarnya jumlah investor lokal di pasar modal Indonesia berpotensi menjadi pemicu naiknya IHSG. Selain itu, pasar juga optimistis terhadap kawasan negara berkembang terutama Asia Tenggara yang masih berkiblat pada Indonesia.

“Sektor perbankan, konstruksi, infrastruktur, dan konsumen akan mempengaruhi pembangunan di Indonesia dan menjadi katalis positif untuk pergerakan indeks.”

Menurutnya, sektor properti belum akan bergerak positif, mengingat adanya pemilihan kepada daerah pada 2018 dan dilanjutkan pemilihan presiden pada 2019. Amrin menilai, sentimen pemilihan umum membuat investor properti cenderung *wait and see*.

Tak lupa, Amrin menuturkan, sektor komoditas juga akan semakin atraktif pada 2018. Di daerah yang melakukan Pilkada, lanjutnya, akan terjadi pengeluaran yang lebih lebih besar sehingga akan mengerek pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Riset Koneksi Kapital Alfred Nainggolan mengungkapkan, apabila pertumbuhan ekonomi nasional pada 2018 dapat bertahan di atas 5%, IHSG berpotensi melanjutkan penguatan.

“Saat pertumbuhan ekonomi 5%, laba rata-rata emiten per September 2017 naik sekitar 11%. Kalau PDB bisa naik ke 5,4%, maka akan lebih baik lagi,” tutur Alfred.



Pendapat berbeda diungkapkan Nico Omer Joncheere, Vice President Research & Analyst PT Valbury Sekuritas Indonesia. Nico cenderung pesimistis dan memperkirakan level tertinggi IHSG pada 2018 berada di kisaran 6.200. Pesimisme ini didasari pada siklus 10 tahun pasar yang akan muncul kembali pada 2018.

“Saya pikir 2018 akan menantang dan tidak semudah 2017, karena ada potensi perekonomian dunia akan melambat karena bank-bank sentral akan melakukan pengetatan moneter,” katanya.

Menurut Nico, Bank Sentral Eropa berpotensi melakukan pengurangan stimulus dari 60 juta euro menjadi 30 juta-40 juta euro. Dalam 8 tahun terakhir, pasar modal cenderung digerakkan oleh likuiditas dari bank sentral dan likuiditas itu berpotensi menyusut.

Bagi Nico, keberhasilan pasar modal pada 2017 dalam mencetak rekor berpotensi tak terulang pada 2018. Menurutnya, koreksi akan terjadi pada 2018 dan setelah koreksi itu, IHSG berpotensi naik pada jangka panjang hingga menembus level 10.000. **(Surya/ Finansial)**

PASAR OBLIGASI 2018

Menangkal Sentimen Global

Beragam sentimen bakal menentukan dinamika pergerakan harga surat utang di Indonesia pada tahun depan, di tengah ekspektasi terhadap tren penurunan imbal hasil.

Sepanjang 2017, Indeks Obligasi Komposit Indonesia bergerak cenderung menguat sejak awal tahun, meski menjelang akhir tahun mulai banyak terkoreksi seiring dengan aksi jual investor asing.

Koreksi di akhir 2017 ini sedikit banyak lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pasalnya, dari dalam negeri hampir semua indikator ekonomi menunjukkan hasil yang positif dan sesuai harapan. Hal ini sekaligus menunjukkan betapa rentannya pasar domestik terhadap pengaruh global.

Sepanjang 2018, faktor-faktor global itu jelas masih akan besar pengaruhnya. The Federal Reserve sudah mengumumkan kebijakan pemangkasan neraca keuangan US\$4,5 triliun yang dimulai Oktober tahun lalu dan berlanjut pada 2018.

Kebijakan ini masih akan diikuti oleh kebijakan kontrol suku bunga seperti yang telah diadopsi The Fed beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat juga berniat memangkas tarif pajak korporasi dan individu.

Hal-hal ini dikhawatirkan akan semakin mendorong arus keluar modal investor asing dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Belum lagi bila Bank Sentral Eropa juga ikut mengurangi stimulus pembelian obligasi.

Bila menimbang tingginya kepemilikan investor asing di surat berharga negara (SBN) yang sempat menyentuh sekitar 40%, jelas keputusan apapun dari investor asing akan memengaruhi pergerakan harga dan imbal hasil obligasi domestik.

Di tengah tantangan sentimen global itu, dari dalam negeri pasar obligasi juga harus berhadapan

dengan iklim politik yang akan semakin memanas jelang pemilihan umum presiden 2019 nanti.

Meski begitu, aktivitas di pasar obligasi 2018 tentu tidak bisa dianggap sepi, menimbang pemerintah masih mengandalkan utang untuk memenuhi sebagian kebutuhan pembiayaan tahunan dan korporasi tergiur dengan tren imbal hasil yang tengah cukup



rendah untuk terbitkan surat utang.

Schneider Siahaan, Direktur Strategi dan Portofolio Utang DJPPR Kementerian Keuangan, mengatakan pasokan yang banyak akan menjaga pasar obligasi 2018 tetap semarak. Inflasi yang diestimasikan masih akan terkendali dan harga volatile food yang terjaga cukup stabil membawa ekspektasi yield obligasi pemerintah sebagai benchmark akan terjaga stabil.

Dia memastikan strategi pembiayaan pemerintah tahun 2018 akan tetap mengedepankan rencana yang terprediksi dan diumumkan terbuka. Pemerintah tetap akan mengandalkan penerbitan SBN rupiah sebagai sumber pembiayaan utama dan SBN valas sebagai pelengkap.

“Sebagai upaya berjaga-jaga, kerangka bond stabilization framework akan tetap diaktifkan untuk menjaga agar harga pasar tetap stabil dan likuid dan semakin dalam,” ungkapnya.

Kalangan analis pun secara umum sepakat pasar obligasi 2018 seharusnya masih akan bergerak dalam tren positif, melanjutkan apa yang terjadi sepanjang 2017.

I Made Adi Saputra, fixed income analyst MNC Sekuritas, mengatakan bahwa hal ini tentu tidak terlepas dari faktor asumsi makroekonomi nasional 2018 yang positif. Target inflasi 2018 sebesar 3,5% merefleksikan adanya potensi penurunan lebih lanjut bagi suku bunga acuan BI 7 DRR setidaknya

25 bps lagi ke level 4%.

Bila hal tersebut benar terjadi, instrumen investasi produk perbankan berpotensi menjadi kurang menarik bagi investor akibat imbal hasil yang semakin mengecil. Hal tersebut akan mendorong pengalihan portofolio investor dari instrumen deposito menuju obligasi.

Asumsi defisit anggaran yang hanya 2,19% pun memberi sinyal positif bahwa pemerintah akan lebih banyak mengoptimalkan

Sebagai upaya berjaga-jaga, kerangka bond stabilization framework akan tetap diaktifkan untuk menjaga agar harga pasar tetap stabil dan likuid dan semakin dalam.

penerimaan pajak untuk kebutuhan pembiayaannya. Target penerbitan SBN netto senilai Rp414 triliun untuk menutup defisit itu relatif tidak akan terlalu membanjiri pasar.

Artinya, akan ada kelebihan likuiditas di pasar yang justru menjadi peluang baik bagi korporasi untuk menerbitkan obligasi tahun 2018 sebelum tahun politik 2019 dimulai.

Dirinya meyakini peluang ini akan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh kalangan korporasi untuk menerbitkan obligasi.

Dengan sentimen positif solidnya makroekonomi nasional, imbal hasil obligasi negara masih berpotensi turun pada 2018 sehingga memberi peluang bagus untuk korporasi melanjutkan penajakannya ke instrumen ini.

Ditambah lagi, tahun 2018 merupakan pertaruhan bagi pemerintah untuk merealisasikan target-targetnya, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur. BUMN yang menjadi ujung tombak pemerintah tentu akan lebih genjar menjajaki instrumen pendanaan dari pasar modal.

“Kalau penerbitan obligasi korporasi 2017 bisa mencapai Rp140 triliun hingga Rp150 triliun, kami perkirakan tahun 2018 masih bisa meningkat antara 20% hingga 30% lagi, terutama didorong oleh penerbitan surat utang BUMN infrastruktur dan perbankan,” ungkapnya.

Hanya saja, korporasi kemungkinan tidak bisa berharap imbal hasil 2018 akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan 2017. Faktor eksternal yang kuat, tantangan politik 2019, peningkatan inflasi jelang pemilu dan efek rampungnya infrastruktur akan menahan laju penurunan.

“Untuk 2018, kami melihat SUN tenor 10 tahun secara moderat akan mencapai 6,34%. Artinya, potensi penurunannya sudah tidak

lagi begitu besar dibandingkan 2017,” katanya.

INTERVENSI

Anil Kumar, analis obligasi Ashmore Asset Management Indonesia, menilai bahwa untuk menjaga momentum imbal hasil rendah, yang dibutuhkan pasar 2018 adalah intervensi pemerintah untuk memastikan nilai tukar rupiah tetap terjaga atau tidak melemah berlebihan.

Hal ini penting untuk mengimbangi tekanan aksi jual investor asing bila sentimen global lebih kuat pengaruhnya. “Dari pada BI turunkan BI rate, yang dibutuhkan pasar justru intervensi di pasar mata uang. BI sudah dapat cadangan devisa yang banyak, seharusnya itu bisa digelontorkan untuk menjaga mata uang,” ungkapnya.

Ramadhan Ario Maruto, associate director fixed income Anugerah Sekuritas Indonesia, menilai koreksi yang terjadi di pasar pada akhir 2017 masih berada dalam batas wajar. Dinamika yang hampir serupa kemungkinan akan berlanjut di 2018. Imbal hasil obligasi Indonesia yang masih jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan banyak negara lain di Asia masih akan menjadi daya tarik bagi investor untuk membenamkan dananya di Indonesia.

Maximilianus Nico Demus, kepala divisi riset Indomitra Sekuritas, sebaliknya justru menyangsikan target pajak akan teralisasi sepenuhnya. Artinya,



penerbitan utang pemerintah besar peluang akan meningkat.

Peningkatan utang otomatis akan mengerek kupon lebih tinggi dan memberatkan beban pemerintah. Dirinya pun meragukan BI akan tetap mempertahankan era suku bunga rendah ketika The Fed terus menaikkan suku bunga yang menyebabkan capital outflow dan tekanan nilai tukar.

Apalagi, terpilihnya Jerome Powell sebagai pengganti Yellen sebagai gubernur The Fed kemungkinan besar akan terus melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan Yellen.

“Ini masih ramalan sebetulnya. Tetapi kalau kita bisa m mendatangkan income tax lebih besar dibandingkan 2017, kita mungkin bisa menaikkan tingkat suku bunga tahun depan tanpa kelewat banyak,” ungkapnya.

Dengan tantangan faktor eksternal yang kuat, tahun depan akan menjadi tahun yang berat bagi pasar obligasi Indonesia setelah melewati reli sepanjang 2017. Masalahnya, daya tahan pasar Indonesia relatif lemah terhadap faktor global, meski semua indikator makroekonomi terlihat positif.

Tentu masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait lainnya untuk menjaga agar pergerakan pasar obligasi Indonesia lebih banyak mencerminkan kekuatan domestik dari pada tekanan eksternal.

Pasar masih berharap setelah Indeks Obligasi Komposite Indonesia berkali-kali mencetak rekor baru sepanjang 2017, hal yang sama masih akan terulang di 2018. **(Surya/Finansial)**

TRANSAKSI NONTUNAI PEMDA

Pijakan untuk Gebrakan Lebih Masif

Bank Sumsel Babel mendukung transaksi nontunai pemerintah daerah sebagai upaya dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Direktur Utama Bank Sumsel Babel M. Adil mengatakan dengan produk teknologi digital yang cukup mapan, sebagai bank milik pemerintah daerah siap melaksanakan implementasi transaksi nontunai pemda, berikut dengan pendampingannya.

“Kami siap melaksanakan percepatan implementasi transaksi nontunai pemda plus pendampingan pelaksanaannya, karena produk teknologi digital Bank Sumsel Babel sangat mumpuni, selama ini transaksi nontunai sudah sebagian dilaksanakan,” katanya dalam sosialisasi transaksi nontunai untuk pemerintah daerah di Tanjung Pandan, Provinsi Babel.

Adil menjelaskan transaksi nontunai pemda melalui cash management system (CMS) dapat



menggunakan instrumen produk Internet Banking BSB, SMS Banking, e-Money (BSB Cash), kartu debit maupun kartu kredit.

“Ini juga sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016, sekaligus menyukseskan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Bank Indonesia,” katanya.

Menurutnya, untuk mendukung GNNT perlu ada sosialisasi untuk sinkronisasi dengan surat edaran Kemendagri tersebut.

Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi tersebut adalah sebagai persiapan percepatan implementasi dari Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi nontunai Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota, mencakup seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi nontunai pada pemerintah daerah.

“Pelaksanaan transaksi nontunai pada pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat pada 1 Januari 2018,” ujar Tjahjo dalam surat edaran tersebut.

Adapun transaksi nontunai yang dimaksud mendagri, meliputi penerimaan daerah yang dilakukan oleh penerimaan/ bendahara penerimaan pembantu, dan pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu.

Untuk persiapan implementasi transaksi nontunai tersebut, kami minta pemda untuk melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank terkait di daerah.

Dia menjelaskan transaksi nontunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

“Untuk persiapan implementasi transaksi nontunai tersebut, kami minta pemda untuk melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank terkait di daerah,” katanya.

Tjahjo melanjutkan, pihaknya juga telah mempertimbangkan keterbatasan infrastruktur di daerah terkait dengan penyelenggaraan transaksi nontunai.

Oleh karena itu, pemda dapat melaksanakan transaksi nontunai secara bertahap

dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeiuaran oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh gubernur.

Sementara itu, Bank Indonesia menyebut bahwa mayoritas pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui BPD.

Namun demikian, belum seluruh BPD memiliki infrastruktur yang memadai untuk melakukan CMS. Selain itu, terdapat persyaratan bahwa bank yang akan melakukan CMS berbasis internet banking minimal harus memenuhi kategori Bank BUKU 2.

Bank sentral mencatat, kondisi saat ini, terdapat beberapa BPD yang masih termasuk kategori Bank BUKU 1. Dalam hal ini, diperlukan sinergi atau kerja sama yang saling mendukung antara BPD dengan bank pemerintah.

Selain itu, BI menilai pengelolaan keuangan daerah secara nontunai perlu didukung dengan instrumen legal (pengaturan) dari kementerian dan pemerintah daerah terkait serta dilengkapi dengan SOP yang memadai.

Sosialisasi terkait implementasi transaksi nontunai pemda juga perlu digalakkan kepada perangkat pemerintah daerah dan mitra pemerintah.



INISIATIF BI

Gerakan Nasional Nontunai telah dicanangkan Bank Indonesia sejak 14 Agustus 2014 dalam rangka mendorong penggunaan sistem pembayaran dan instrumen pembayaran nontunai.

Bank sentral sendiri menyadari bahwa implementasi GNNT tidak hanya memerlukan keterlibatan BI selaku regulator sistem pembayaran, namun juga dukungan dari kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, pelaku industri sistem pembayaran dan masyarakat.

Deputi Direktur Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumsel Muhammad Seto Pranoto mengatakan BI Sumsel mendukung transaksi nontunai di Sumsel mengingat manfaat yang begitu besar melalui transaksi tersebut, salah satunya mendukung inklusi keuangan di daerah.

“Sebetulnya beberapa jenis transaksi antara pemda dan publik sudah dilaksanakan seperti pembayaran gaji melalui rekening,” katanya.

Dia menambahkan penyaluran beberapa skim bantuan juga sudah secara nontunai. Menurutnya, Bank Sumsel Babel sudah siap untuk melayani transaksi nontunai pemda, pasalnya saat ini saja BPD itu sudah mengantongi izin penerbitan uang elektronik dan perluasan jaringan layanan bank.

“Kalau pemdanya sejauh ini sudah mendukung penuh GNNT. Transaksi nontunai itu harus didukung oleh akurasi updating data secara regular, ini yang perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Adapun potensi pembayaran nontunai pada pemerintah daerah mencakup transaksi P2G, B2G, G2P dan G2B.

Kondisi saat ini, penempatan uang negara dikelola oleh menteri keuangan selaku bendahara umum

negara yang mana rekening kas umum negara (RKUN) ditempatkan di bank sentral. Sementara rekening kas umum daerah (RKUD) dikelola oleh gubernur/bupati/wali kota dan ditempatkan pada bank yang ditetapkan oleh kepala daerah tersebut.

Menurut BI, anggaran pemda yang berpotensi untuk dilakukan secara nontunai penerimaan setoran pajak atau retribusi dari wajib pajak. Serta, pembayaran belanja modal, barang dan jasa dan pegawai kepada pihak ketiga.

Implementasi transaksi nontunai pada pemda dapat diprioritaskan untuk transaksi pengeluaran dengan mempertimbangkan share belanja modal, barang dan jasa, serta belanja pegawai terhadap total belanja daerah mencapai 66,7%, sedangkan share setoran pajak dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 6,7%. **(Dinda/Finansial)**

DUTA LAYANAN BANK SUMSEL BABEL

Mengukur Kualitas Layanan di Barisan Terdepan

Bank Sumsel Babel kembali menggelar pemilihan Duta Layanan sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas SDM bank tersebut.

Direktur Utama Bank Sumsel Babel M. Adil mengatakan pihaknya ingin menyiapkan pegawai yang berdaya saing tinggi di industri perbankan.

“Kami harus menyiapkan pegawai yang siap bersaing, memiliki daya saing, Kami BSB harus lebih baik lagi untuk mempertahankan juara Service Excellence BPD di tahun 2018,”

katanya saat malam puncak perayaan HUT BSB dan pemilihan duta layanan BSB.

Adil mengatakan, pemilihan duta layanan juga merupakan rangkaian kegiatan HUT perusahaan ke-60. Menurutnya, seluruh peserta duta layanan dikarantina selama 5 hari dan diberikan berbagai pelatihan mulai dari komunikasi, marketing, personality, produk bank, digital banking, hingga roleplay.

Pemilihan Duta Layanan BSB itu, kata dia, diikuti juara duta layanan seluruh cabang BSB konvensional

dan syariah, terdiri dari 32 customer service, 32 teller, 32 security.

Setelah melalui proses penilaian yang ketat, para pemenang kategori diumumkan pada malam puncak yang meliputi kategori customer service yang diraih oleh Nur Permata Agustin dari cabang Palembang sebagai juara ke-1, Fatimah Ericha dari cabang Sekayu meraih juara ke-2 dan Nurma Yuliani dari cabang Sekayu meraih juara ke-3.

Selanjutnya untuk kategori teller juara pertama diraih Irin Artha dari cabang Kapten A.





Rivai, juara ke-2 diraih Slyvia dari cabang Kapten A. Rivai dan juara ketiga diraih Nurulita Ramadani dari Cabang Sungailiat.

Untuk kategori security, juara pertama diraih Sidik dari cabang Jakabaring, juara kedua diraih Mulyadi dari cabang Kapten A. Rivai dan juara ketiga diraih Lesmana Saputra dari Cabang Sekayu.

Juara pertama teller Irin Artha mengatakan butuh persiapan khusus untuk mengikuti kompetisi bergengsi di lingkungan tempat ia bekerja tersebut.

Pasalnya, ibu dua anak itu tidak hanya melakukan persiapan mental melainkan juga persiapan fisik dan penampilan.

“Saya harus menurunkan berat badan hingga 30 kilogram selepas melahirkan anak kedua agar tetap tampil menarik dan

prima. Ini persiapan yang paling berat. Alhamdulillah usaha saya dapat memberikan hasil optimal, apalagi saya mewakili cabang Kapten A. Rivai Palembang selaku cabang utama,” kata teller lulusan Universitas Sriwijaya tersebut.

Irin mengatakan dirinya juga rutin melakukan roleplay agar layanan tetap sesuai standar Bank Sumsel Babel.

Menurut perempuan yang sudah bergabung dengan Bank Sumsel Babel sejak 2011 itu, lomba Duta Layanan memotivasi dirinya untuk menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.

“Saya memandang nasabah seperti cermin. Jadi lisan dan ekspresi yang saya lakukan akan terefleksikan kepada nasabah,” katanya.

Selain itu, selama masa karantina, ia mengaku banyak mendapat ilmu yang tidak diperoleh di tempat lain. “Dan tentunya dengan mengikuti ajang Duta Layanan saya jadi punya kesempatan untuk mengapresiasi pimpinan di cabang Kapten Arivai, yakni Bapak Sahrul Yahya, Ibu Asviva Linda, Bapak Rizwan, dan Ibu Nurhasanah,” katanya.

Irin sendiri sebelumnya telah memberikan prestasi kepada Bank Sumsel Babel dengan menjadi juara 1 Porseni 2013 pada cabang olahraga menghitung uang dan keaslian uang dan juara 2 Porseni 2015 cabang serupa.

AJANG MOTIVASI

Sama seperti Irin, juara 1 kategori customer service Nur Permata Agustin mengaku



kompetisi Duta Layanan menjadi ajang motivasi bagi dirinya untuk menjadi lebih baik dalam bidang yang ia tekuni.

Menurut gadis kelahiran 31 Agustus 1991 itu, lomba Duta Layanan bisa mengukur kualitas layanan customer service apakah sebagai garda terdepan sudah baik atau belum dalam melayani nasabah.

“Pemenang juga bisa menjadi role model bagi rekan customer service lainnya agar bisa lebih baik dalam memberikan service excellent kepada nasabah,” kata perempuan yang akrab disapa Utin itu.

Tak hanya itu, Utin mengaku, salah satu hal yang membuat dia tertarik mengikuti kompetisi Duta Layanan dan berambisi menjadi pemenang tidak lain karena

hadiah yang diberikan perusahaan.

“Saya tertarik karena hadiahnya juga yakni berupa uang tunai dan tur ke luar negeri, tentu saja bikin tambah semangat,” katanya.

Utin mengatakan dirinya juga melakukan banyak persiapan untuk lomba tersebut, di mana saat karantina, dirinya sering latihan roleplay, belajar produk-produk perbankan Bank Sumsel Babel, latihan public speaking, latihan pemaparan, sampai latihan jalan di catwalk.

“Kami latihannya habis jam layanan di banking hall kantor, yang jadi coach mulai dari kepala cabang, wakil pemimpin cabang, penyalia, rekan kantor dan juara duta layanan 2016,” katanya.

Menurut Utin, selama menjadi customer service sejak 2014 lalu telah banyak pengalaman baik

suka dan duka yang ia rasakan saat melayani nasabah.

“Banyak pengalaman karena mayoritas nasabah ibu-ibu atau bapak-bapak jadi ada yang mau jodohin anaknya, pernah ada yang anterin makanan ke kantor. Ketemu nasabah yang marah-marah juga pernah karena dia ngotot mau transaksi tapi tidak bawa KTP,” katanya seraya tertawa.

Utin menambahkan, lomba Duta Layanan diharapkan dapat membuat Bank Sumsel Babel semakin maju dan berkembang tidak hanya di Sumsel dan Babel tapi juga ke seluruh Indonesia.

“Saya optimistis dari segi layanan Bank Sumsel Babel siap bersaing dengan bank pelat merah lainnya,” katanya. **(Dinda/ Finansial)**

Surga Tersembunyi di Gili Labak

Selama ini Madura lebih termasyur dengan predikat Pulau Garam. Belum banyak yang tahu pulau yang terletak di seberang batas utara Kota Surabaya, Jawa Timur itu juga menyimpan segudang daya tarik pariwisata nan memikat.

Salah satunya adalah Gili Labak, yang kerap dijuluki sebagai ‘surga yang tersembunyi’ (*the hidden paradise*). Destinasi pelesir ini sangat ideal bagi para pecinta pantai yang mendambakan ketenangan dan keindahan laut yang masih ‘perawan’.

Sebenarnya, Gili Labak adalah sebuah pulau mikro yang terpisah dari daratan utama Madura. Namun, posisinya masih tercakup ke dalam wilayah Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep yang terletak di bagian timur Pulau Garam.

Karena lokasinya yang cukup terpencil, untuk menjangkau Gili



Labak dibutuhkan niat dan sedikit perjuangan. Jika bertolak dari Surabaya dengan menggunakan mobil, lebih baik berangkat dini hari sekitar pukul 12.00 atau 01.00 pagi.

Dengan demikian, Anda akan terhindar dari kemacetan dan bisa tiba di wilayah Sumenep sekitar pukul 06:00 pagi. Setibanya di Sumenep, langsung saja menuju

ke Pelabuhan Kalianget untuk menyeberang ke Gili Labak.

Letak Kecamatan Kalianget sendiri sebenarnya persis di seberang barat Pulau Talango dengan jarak terpisah laut sekitar 500 meter. Namun, perjalanan dari Kalianget ke Gili Labak membutuhkan waktu sekitar 2–3 jam dengan kapal cepat (*speed boat*).

Salah satu alasan yang menjadikan Gili Labak bak ‘surga yang tersembunyi’ adalah lautnya yang sangat jernih dan kebiruan. Perairan yang mengelilingi pulau tersebut bak hamparan lantai kaca bening yang menjadi etalase tempat bermain ikan–ikan hias dan terumbu karang.

Bagi Anda yang mudah mabuk laut, sangat disarankan untuk tidak pergi saat musim hujan. Sebab, ombak di lautan sekitar Madura terkenal cukup ganas. Sehingga, melakukan aktivitas *snorkeling* pun sangat tidak dianjurkan karena berbahaya.

Lebih baik bersabar menunggu musim panas tiba. Meskipun cuaca terik, keadaan laut lebih ‘jinak’ sehingga Anda pun bisa bermain-main di pantai dengan leluasa hingga puas. Tak hanya itu, keindahan bawah laut pun bisa lebih terlihat dengan jelas.

KEINDAHAN LAUT

Salah satu alasan yang menjadikan Gili Labak bak ‘surga yang tersembunyi’ adalah lautnya yang sangat jernih dan kebiruan. Perairan yang mengelilingi pulau

tersebut bak hamparan lantai kaca bening yang menjadi etalase tempat bermain ikan-ikan hias dan terumbu karang.

Itulah mengapa tidak lengkap rasanya jika ke Gili Labak tanpa *snorkeling*. Sayangnya, belum ada titik penyelaman (*diving spot*) yang direkomendasikan di sekitar Gili Labak. Selain itu, mayoritas terumbu karang di sana masih muda dengan biodiversitas yang relatif terbatas.

Akan tetapi, *snorkeling* saja sudah cukup menjadi kegiatan seru ‘*ala-ala*’ saat melancong ke sana. Anda dapat menggunakan peralatan *snorkeling* yang disediakan saat menyewa *speed boat*. Namun, akan lebih baik jika membawa peralatan pribadi.

Karena masih belum banyak terekspose dan ramai kunjungan





Tip dan Trik Berwisata ke Gili Labak:

1. Jika bertolak dari Surabaya dengan mobil, sebaiknya berangkat dini hari sebelum pukul 03.00.
2. Waktu terbaik berwisata ke Gili Labak adalah saat musim panas pada pertengahan tahun.
3. Saat di Pelabuhan Kalianget, pintar-pintarlah menawar sewa speed boat. Rata-rata harga yang diajakan adalah Rp100.000/orang, tetapi Anda bisa menawarnya dengan harga lebih murah. Apalagi, jika Anda punya kenalan yang bisa berbahasa Madura.
4. Sebaiknya membawa bekal sendiri karena penjaja makanan di Gili Labak sangat jarang.
5. Hindari menggunakan pembungkus kertas dan plastik agar tidak mengotori lingkungan dengan sampah.
6. Jika berniat snorkeling, lebih baik membawa peralatan milik pribadi. Sebab, kualitas peralatan yang disewakan kurang baik.
7. Jangan lupa membawa kamera tahan air/kamera bawah laut, pakaian ganti, obat-obatan pribadi, dan tabir surya.



pelancong, kawasan Gili Labak sangat minim infrastruktur, fasilitas, dan layanan umum. Tidak ada penginapan, apalagi *resort*. Jumlah penjaja makanan pun

sangat terbatas.

Kelemahan lainnya adalah wilayah pulau yang sangat kecil sehingga Anda dapat mengelilinginya dengan berjalan kaki dalam waktu kurang

dari satu jam; tanpa ada banyak hal yang bisa dilakukan.

Akan tetapi, jika ingin merasakan sensasi wisata alam yang penuh kesan, Anda bisa membawa peralatan berkemah dan melakukan *beach camp* di sana. Suasana pulau dan pantai yang sepi menjadikannya ideal untuk aktivitas tersebut.

Ajaklah beberapa kawan untuk *beach camp* bersama, bermain di pasir putih yang bebas sampah, laut yang jernih, menikmati pemandangan matahari terbit dan terbenam, mendengar deburan ombak saat malam tiba, dan menikmati keheningan laut yang meneduhkan hati.

Satu hal yang wajib dibawa adalah kamera tahan air dengan resolusi tinggi. Sebab, Gili Labak menyimpan banyak sekali titik berfoto ria yang 'Instagram-able', baik di pantainya yang bersih maupun di bawah lautnya yang jernih.

Dijamin, pengalaman menemukan 'surga yang tersembunyi' di Gili Labak akan menjadi tidak terlupakan. Jangan lupa, saat di perjalanan pulang, sempatkanlah diri untuk mampir dan mencoba berbagai panganan khas Sumenep, seperti; campor, nasi romi, dan rujak madura.

(Surya/Finansial)

Harga Nyawamu & Premi Asuransi

Pernahkah Anda dikejar-kejar seorang agen asuransi? Tentu sangat menyebalkan. Terkadang Anda harus bermain kucing-kucingan. Ingat, pada saat Anda menyerah dan mempercayakan sepenuhnya pilihan asuransi pada seorang agen, keputusan itu bisa saja keliru.

Soalnya, seorang agen belum tentu mengenal kebutuhan dan mengetahui kemampuan membayar premi. Pengalaman sehari-hari sering menceritakan hal itu. Apalagi kalau si agen asuransi tidak memiliki pengetahuan investasi dan hanya bekerja untuk memenuhi sebuah

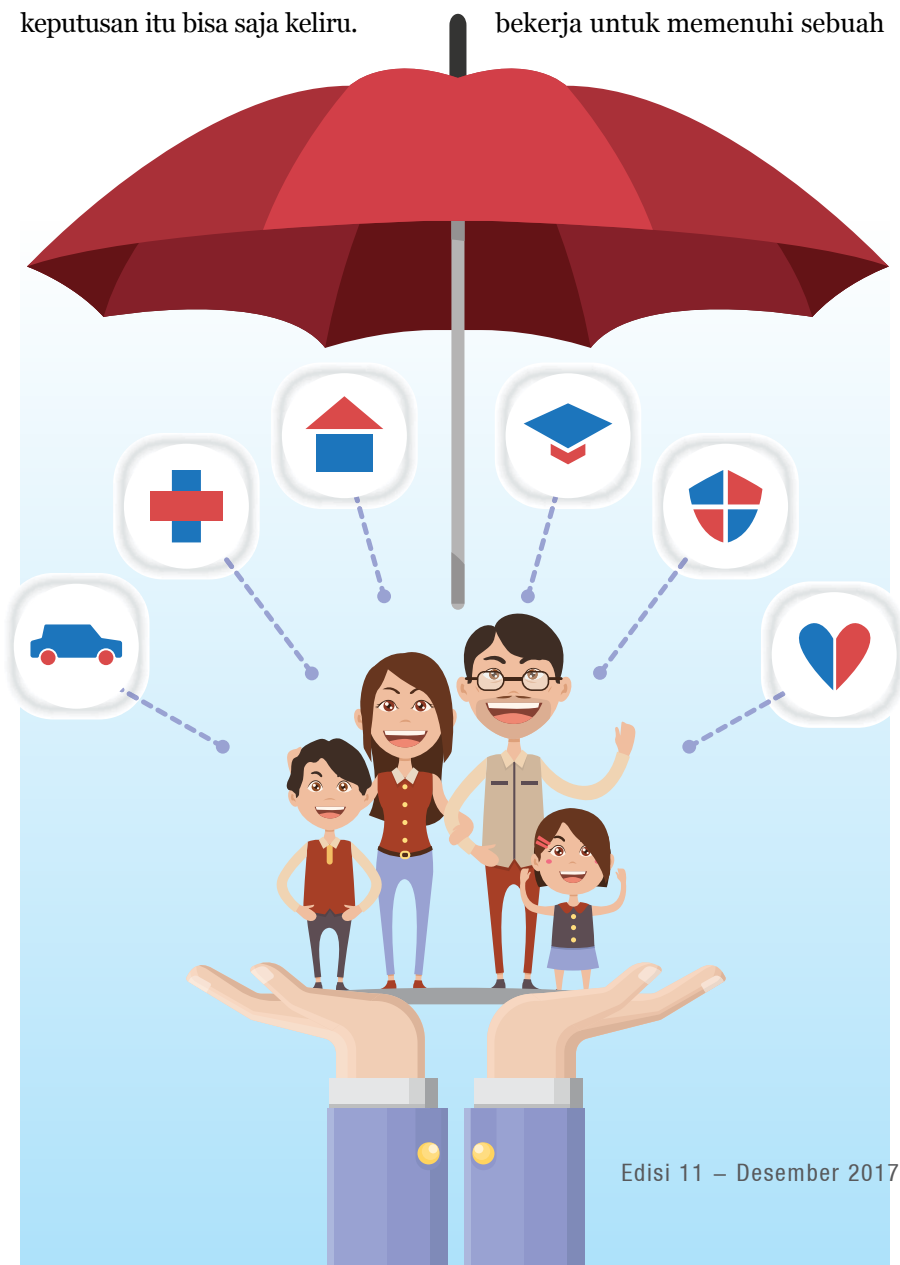
target yang bernama komisi.

Jangan pernah berpikir bahwa mereka akan melayani kepentingan nasabah dan menjawab kebutuhan si tertanggung secara tepat. Benar, bagi seseorang yang paham dengan investasi, asuransi jiwa itu sangat mendesak dan menjadi pilihan utama dalam merencanakan keuangan dalam keluarga.

Namun, betapa sangat disayangkan kalau Anda sendiri tidak mengetahui secara tepat berapa nilai pertanggungan yang dibutuhkan. Inilah yang banyak disepelekan oleh sebagian masyarakat. Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap risiko yang mungkin terjadi terbilang masih sangat rendah.

Besarnya premi asuransi yang harus dibayarkan setiap bulan menjadi salah satu alasan sebagian besar orang untuk memutuskan membeli asuransi atau tidak. Masih banyak orang yang belum paham bagaimana cara menghitung uang pertanggungan berdasarkan premi yang dibayarkan, terutama asuransi jiwa yang bersifat jangka panjang.

Padahal, untuk urusan itu ada rumusan yang bisa dipelajari. Karena menyangkut perlindungan terhadap risiko kematian, sebenarnya Anda diminta untuk bisa menghitung sendiri secara tepat berapa harga nyawa Anda yang harus ditanggung oleh sebuah perusahaan asuransi.



Dengan demikian risiko kehilangan jiwa itu bisa digantikan asuransi saat Anda meninggal. Kalau begitu keluarga yang ditinggalkan tidak terpukul secara finansial saat malaikat maut datang menjemput Anda.

Ilmu manajemen risiko memperkenalkan dua cara dalam menghitung kebutuhan asuransi jiwa. *Pertama*, yaitu dengan menghitung Nilai Kehidupan (*Human Life Value/HLV*) sehingga Anda tidak keliru dalam menentukan besar kebutuhan perlindungan atau nilai tertanggung yang dibutuhkan sebelum membeli polis asuransi.

Agar bisa menentukan HLV, tiga pertanyaan berikut harus dijawab secara jujur. Adakah kebutuhan akan asuransi itu? Berapa lama perlindungan dibutuhkan? Berapa besar penghasilan Anda per bulan atau per tahun?

Mari kita ambil kasus berikut. Seorang ayah, sebut saja namanya Pak Andi, mengepalai sebuah keluarga kecil dengan dua anak masing-masing berusia 5 dan 3 tahun. Pada usia 35 tahun Pak Andi bekerja pada sebuah perusahaan swasta dengan penghasilan Rp 10 juta per bulan. Istrinya tidak berpenghasilan karena bekerja sebagai ibu rumah tangga secara penuh.

Pak Andi menginginkan proteksi asuransi yang cukup terjangkau sehingga dapat memberi perlindungan sampai anaknya yang terkecil selesai

Agar bisa menentukan HLV, tiga pertanyaan berikut harus dijawab secara jujur. Adakah kebutuhan akan asuransi itu? Berapa lama perlindungan dibutuhkan? Berapa besar penghasilan Anda per bulan atau per tahun?

bersekolah, atau sampai dia mencapai usia pensiun (55 tahun). Itu berarti Pak Andi harus bekerja 24 tahun lagi.

Dari pengalaman Pak Andi di atas, kebutuhan bulanan yang harus dilindungi adalah sebesar Rp10 juta per bulan atau setara dengan Rp120 juta per tahun. Dengan lama perlindungan 20 tahun, maka nilai kehidupan yang harus diproteksi adalah sebesar Rp120 juta x 20 tahun sehingga menjadi Rp2,4 miliar nilainya saat ini.

Contoh tersebut memberikan hitungan kasar berapa besar asuransi yang harus dimiliki oleh seorang kepala keluarga seperti Pak Andi. Tentu nilainya fluktuatif, bisa menurun atau meningkat sesuai dengan lamanya waktu perlindungan, kenaikan gaji tahunan serta perubahan nilai inflasi.

Selanjutnya Pak Andi tinggal mencari asuransi yang bisa

memberikan perlindungan Rp2,4 miliar dengan premi yang terjangkau.

Apabila premi untuk nilai sebesar Rp2,4 miliar terlalu mahal, maka akan digunakan perhitungan *kedua* yang disebut dengan nilai perlindungan berdasarkan penghasilan (*Income Based Protection*).

Misalnya saja untuk perhitungan yang kedua juga berlaku untuk kasus Pak Andi yang memiliki penghasilan Rp10 juta per bulan. Untuk itu perlu segera dicari tahu berapa besar tabungan atau investasi tanpa risiko untuk dapat menghasilkan Rp10 juta per bulan.

Angka itu bisa dilacak dengan menggunakan perhitungan bunga investasi tanpa risiko (di Indonesia memakai SBI) misalkan sebesar 11% kotor atau 8,8% bersih per tahun (0,73% per bulan). Maka akan diperoleh angka investasi senilai Rp1,375 miliar x 0,73% sehingga menjadi Rp10.073.500.

Karena itu, apabila Pak Andi tidak dapat memilih proteksi asuransi Rp2,4 miliar karena harga preminya yang terlalu tinggi, maka sekurang-kurangnya proteksi yang harus dimiliki adalah minimal sebesar Rp1,375 miliar.

Dengan dua cara hitungan tersebut di atas, Anda dapat menentukan berapa besar nilai pertanggung jiwa yang harus ditanggung melalui asuransi. Atau dengan lain perkataan dengan cara demikianlah harga nyawa Anda dihitung. **(Finansial)**

DEFISIT BPJS KESEHATAN

Anggaran Tekor, Siapa Teledor?

Sejak kehadirannya pada 2014, BPJS Kesehatan memberi warna tersendiri pada layanan kesehatan. Banyak orang yang mencerca kualitas layanan BPJS Kesehatan yang dinilai belum memuaskan. Namun, lebih banyak yang memuji dan berterima kasih karena telah memanfaatkan BPJS Kesehatan.

Laporan Capaian Tiga Tahun Pemerintahan Joko Widodo & Jusuf Kalla misalnya, memberikan sedikit gambaran ke mana arah program kesehatan yang dicanangkan pemerintah. Pemerintah menargetkan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan mencapai 100% pada 2019.

Target itu sepertinya masih sulit untuk direalisasikan jika berkaca dari total jumlah penduduk dan pencapaian JKN yang dilakukan BPJS Kesehatan. Penerima Kartu Indonesia Sehat, misalnya, telah mencapai 92,26 juta pada Oktober 2017 atau setara dengan 50,69% dari total peserta JKN yang mencapai 182 juta.

Pada sisi lain, Nota Keuangan dan RAPBN 2018 menyebut dalam RPJMN, pemerintah menargetkan

kepesertaan program jaminan kesehatan nasional mencapai 99% pada 2019, sementara proyeksi realisasi yang mampu dicapai BPJS Kesehatan ialah 82,3% pada 2019.

Laporan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang dilansir Nota Keuangan juga menyebutkan pada 3 tahun pertama DJS Kesehatan mengalami defisit.

Tiga penyebab yang disebutkan pemerintah adalah tingginya rasio klaim dan rendahnya pendapatan iuran khususnya bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP), fenomena *adverse selection*, dan kemungkinan perilaku *moral hazard* yang dilakukan pada fasilitas kesehatan.

Untuk tetap menjalankan amanat program JKN, pemerintah pun terpaksa melakukan



intervensi melalui PMN masing-masing senilai Rp5 triliun pada 2015 dan Rp6,8 triliun pada 2016, serta belanja negara sebesar Rp3,6 triliun pada 2017.

Target, ambisi, dan capaian program JKN sejauh ini tentu patut diapresiasi. Namun, jika melihat beban keuangan yang harus dikeluarkan negara untuk program JKN, apresiasi bisa saja *lips service* semata.

Dengan 3 tahun beruntun defisit, sudah sepatutnya memikirkan terobosan konkret untuk menambal defisit program JKN.

Berapa banyak tambahan peserta BPJS Kesehatan khususnya dari masyarakat yang mampu? Atau, bersediakah negara terus menambal defisit untuk kelalaian dan cara hidup tidak sehat yang dilakukan warganya dengan berlindung pada UU No. 36/2009 tentang Kesehatan yaitu negara mengalokasikan 5% dari APBN dan 10% dari APBD untuk kesehatan?



ANGGARAN BERIMBANG

Juru Bicara BPJS Kesehatan Nopi Hidayat menuturkan, Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan pada dasarnya selalu dihitung dengan pendekatan dan prinsip anggaran berimbang pada setiap awal tahun anggaran.

Prinsip umum anggaran berimbang itu antara lain pengeluaran dan pendapatan harus sama, serta pendapatan utama bersumber dari iuran peserta.

“Berdasarkan hitungan aktuarial, iuran saat ini belum sesuai dengan angka ideal, karenanya program ini *structurally unfunded*.”

Seperti diketahui, berdasarkan perhitungan aktuarial dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada 2015 terdapat *missmatch* antara pendapatan dan beban yang akan membuat BPJS Kesehatan terus defisit.

Tarif untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) atau masyarakat yang mendapatkan

subsidi pemerintah, baik APBN maupun APBD, yang ditetapkan pemerintah senilai Rp23.000.

Padahal, iuran ideal buat PBI ialah Rp36.000 atau minus 13.000 per JKN-KIS. Dengan total peserta JKN-KIS sebanyak 92,26 juta orang bisa dibayangkan berapa beban yang harus ditanggung BPJS.

BPJS Kesehatan menyebutkan, hanya iuran peserta kelas 1 yang sesuai, sedangkan kelas 2 masih minus Rp12.000 per kepala, dan kelas 3 minus Rp27.500 per kepala.

Nopi menuturkan, kondisi defisit BPJS Kesehatan sudah diprediksi sejak awal. Dalam proses pengesahan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) BPJS Kesehatan, yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional, sudah diprediksi bakal defisit jauh sebelum hal itu terjadi.

Dia menjelaskan, pemerintah memilih untuk mengatasi defisit program kesehatan ini dengan anggaran negara. Pilihan itu sekaligus menegasi solusi dalam menaikkan iuran atau mengurangi manfaat program bagi masyarakat.

Menurutnya, terdapat tiga opsi yang dimiliki pemerintah sejauh ini. *Pertama*, menaikkan iuran. Namun, hal ini tidak menjadi pilihan karena pemerintah tidak ingin membebani rakyat.

Kedua, mengurangi manfaat pelayanan kesehatan. Misalnya, pelayanan untuk kelompok diagnosis penyakit-penyakit jantung tidak dilayani lagi. “Pasti defisit hilang dengan sendirinya. Namun ini tidak akan menjadi pilihan,” tambahnya.

Ketiga, sesuai dengan PP No. 87/2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, pemerintah menyuntikkan dana tambahan lewat APBN untuk

mengatasi defisit. Pilihan terakhir ini, jelasnya, masih menjadi cara pemerintah untuk menghadirkan negara dalam hal jaminan kesehatan bagi rakyat.

Nopi mengklaim, pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk menutup defisit. *Pertama*, penguatan sistem rujukan dari FKTP hingga rumah sakit. Apabila sebagian besar pelayanan kesehatan bisa dilakukan di tingkat primer, pengeluaran BPJS Kesehatan juga akan berkurang.

Kedua, pemerintah pusat melakukan transfer dana ke daerah dari alokasi 5% anggaran kesehatan dalam APBN. *Ketiga* pemerintah berencana menggunakan sebagian pajak rokok untuk menutup defisit BPJS Kesehatan pada masa mendatang,” tambahnya.

Secara terpisah, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menuturkan, terdapat tiga hal penyebab BPJS Kesehatan menderita defisit. *Pertama*, anggaran iuran PBI dari pemerintah pusat dan daerah tidak sesuai aktuaria yang senilai Rp36.000.

“Iuran PBI pada 2014 dan 2015 sebesar Rp19.225 per orang per bulan. Pada 2016 dan 2017 menjadi Rp23.000. Iuran ini masih belum sesuai dengan iuran yang dihitung secara aktuaria,” ujarnya.

Dia berpendapat, jika tidak ingin defisit, menaikkan iuran PBI bisa menjadi pilihan. Hal itu sudah diatur dalam Pasal 161 Perpres No. 19/2016 yang mengamanatkan iuran

PBI naik setiap 2 tahun. Namun, pemerintah nampaknya tidak memiliki kemauan untuk menaikkan iuran PBI sehingga pada 2018 defisit diprediksi akan lebih besar lagi.

Kedua, menurut Timboel, kinerja Direksi BPJS Kesehatan tidak optimal. Hal itu terlihat dari jauhnya capaian dari target yang ditetapkan. Dia menjelaskan, RKAT 30 Juni 2017 target kepesertaan harusnya mencapai 187 juta tetapi hanya teralisasi sebanyak 178 juta, begitu juga dengan iuran yang ditargetkan Rp41 triliun tetapi teralisasi di bawah Rp35 triliun.

“Tentunya kinerja direksi BPJS Kesehatan akan menentukan juga defisit atau tidak. Kalau menurut saya kinerja direksi tidak baik.”

Ketiga, banyak rumah sakit yang cenderung tidak mematuhi perjanjian kerja sama (PKS) dengan BPJS Kesehatan. Acap kali, pasien JKN disuruh pulang dalam kondisi yang belum layak yang selanjutnya disuruh masuk lagi untuk dirawat.

“Ini artinya satu pasien JKN oleh RS bisa diklaim berkali-kali. Seharusnya, jika mengacu kepada PKS, pasien harus disembuhkan tanpa disuruh pulang dulu.”

KECURANGAN KLAIM

Selain masalah defisit, BPJS Kesehatan juga dihadapkan pada persoalan klaim tidak sesuai prosedur. Hingga Juni 2017, BPJS Kesehatan mengidentifikasi sekitar Rp2,59 triliun tagihan biaya klaim

program jaminan kesehatan nasional yang dinilai tidak sesuai prosedur.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, total nilai tagihan tersebut merupakan akumulasi selama 3 tahun atau sejak program jaminan kesehatan nasional (JKN) dilaksanakan.

“Setiap klaim yang masuk selalu diverifikasi lagi. Dari beberapa tagihan, klaim yang masuk itu ada beberapa yang tidak sesuai ketentuan,” paparnya.

Dia menegaskan, BPJS Kesehatan tidak akan memproses pengajuan klaim yang dinilai tidak sesuai prosedur. Menurutnya, pengajuan klaim yang tidak sesuai prosedur akan dikembalikan kepada pihak terkait untuk dilengkapi berkas-berkasnya. Jika tidak ada berkas pendukung, penyaluran biaya klaim tidak akan dilakukan.

Fachmi mengungkapkan, tidak seluruh tagihan yang tidak sesuai prosedur dapat dikategorikan sebagai praktik kecurangan (*fraud*). Pasaunya, ada juga pengajuan klaim tak sesuai ketentuan yang disebabkan kesalahan tidak disengaja, misalnya kesalahan pada pencatatan data.

Untuk mencegah praktik kecurangan dalam program JKN, BPJS Kesehatan bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membentuk tim pengawas bersama. **(Finansial)**



Sehat dan Nge-Jazz Bareng di HUT ke-60 BSB



Setelah melalui beberapa rangkaian kegiatan dalam peringatan HUT ke-60, Bank Sumsel Babel kembali menyelenggarakan kegiatan Jalan Santai bagi seluruh pegawai dan keluarga besar Bank Sumsel Babel.

Kegiatan yang diikuti lebih kurang 3.000 peserta ini selain melibatkan segenap top manajemen BSB, pegawai dan keluarga, juga turut melibatkan

beberapa anak perusahaan dalam pelaksanaannya.

Saekan Noer selaku ketua pelaksana kegiatan Jalan Sehat mengatakan telah menyediakan ratusan hadiah menarik bagi para peserta yang beruntung dengan melakukan pengundian kupon jalan santai dengan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor.

Pada hari yang sama, setelah menggelar jalan santai bagi seluruh

pegawai, Bank Sumsel Babel menyelenggarakan Festival Jazz yang bertajuk Digi Jazz bertempat di halaman gedung kantor pusat Bank Sumsel Babel Jakabaring. Dalam kegiatan tersebut, selain turut diisi oleh beberapa komunitas jazz di Kota Palembang juga turut diisi oleh beberapa komunitas jazz baik dari Yogyakarta maupun Batam.

Namun yang menjadi bintang utama pada pertunjukan Digi Jazz tersebut adalah Sierra Soetedjo dan Tompi. Sierra Soetedjo yang tampil menawan pada malam itu berhasil membius penonton yang hadir dengan beberapa *single* yang dibawakannya. Suasana pun semakin riuh ketika Tompi memasuki panggung dan membawakan beberapa *single* yang cukup familiar di telinga penonton.

Pada kesempatan tersebut, Tompi memberikan apresiasi atas apa yang telah dilaksanakan Bank Sumsel Babel guna turut mengembangkan dan membesarkan musik Jazz di Kota Palembang. "Karena baru Bank Sumsel Babel, BPD di Indonesia yang melaksanakan Festival Jazz dalam ulang tahunnya," ujarnya.

Sejalan dengan tajuk Digi Jazz, pada malam tersebut Bank Sumsel Babel selaku penyelenggara turut mengundang beberapa nasabah prioritasnya sebagai penonton dan menyediakan BSB Cash sebagai sarana bagi nasabahnya untuk melakukan pembelian makanan atau minuman di beberapa *tenant* yang telah tersedia. (*)





Khatam Alquran di Rangkaian Kegiatan HUT ke-60

Di usianya yang ke-60 tahun, sebagai bentuk rasa syukur atas prestasi dan pencapaian positif yang telah diperoleh Bank Sumsel Babel selama tahun 2017, Bank Sumsel Babel banyak mengadakan beberapa rangkaian kegiatan baik hiburan, olahraga maupun sosial. Sedikit berbeda pada tahun ini, bertepatan dengan hari lahirnya, Bank Sumsel Babel menggelar acara pengajian dan pengkhataman Alquran secara bersama-sama.



Acara yang digagas Bank Sumsel Babel tersebut turut mengundang dan melibatkan 325 orang santri dan santriwati dari enam pondok pesantren berbeda yang ada di Kota Palembang antara lain Ponpes Nurul Quran, Ponpes Jamiatul Quro, Ponpes Ma'hatillawah Al Quran, Ponpes

Ahlul Quran, Ponpes Lativia dan Ponpes Al Burhan.

Bertempat di lantai 4 Gedung kantor pusat Bank Sumsel Babel di Jakabaring, acara tersebut di buka dengan sholat Ashar bersama sama dan sambutan dari Direktur Utama Bank Sumsel Babel Muhammad Adil. (*)

Tali Kasih Pererat Silaturahmi



Sebagai bentuk rasa syukur yang mendalam atas usianya yang telah mencapai 60 tahun

berkembang dan menjadi besar di daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, sama seperti

tahun-tahun sebelumnya, segenap manajemen Bank Sumsel Babel kembali melaksanakan acara Silaturahmi dan Tali Kasih kepada para ahli waris, almarhum dan almarhumah mantan direksi dan pegawai serta pensiunan Bank Sumsel Babel.

Adapun tujuan diadakannya kegiatan silaturahmi tersebut adalah wujud perhatian perusahaan serta untuk menghormati dan mengenang jasa para pegawai Bank Sumsel Babel yang telah banyak membaktikan dirinya demi kemajuan Bank Sumsel Babel. (*)



Pelayanan Langsung Direksi Bank Sumsel Babel

bertransaksi di kantor cabangnya masing masing.

Adapun kantor cabang yang dikunjungi tersebut yakni Cabang Kapten A. Rivai, Cabang Palembang, Cabang Jakabaring dan Cabang Syariah Palembang. Di moment tersebut, semua Direksi memberikan wejangan/pengarahan kepada semua pegawai cabang dan turut serta dalam memberikan pelayanan kepada setiap nasabah yang berkunjung untuk bertransaksi.

Sebelum turun langsung melayani nasabahnya, masing masing direksi melakukan

pemotongan tumpeng dan memberikannya langsung kepada pegawai yang termuda, tertua, dan kepada nasabah pertama yang hadir di hari tersebut.

Adapun tujuan dilaksanakannya hal tersebut adalah agar semua nasabah Bank Sumsel Babel dapat lebih mengenal, lebih dekat dan lebih erat dengan Bank Sumsel Babel dan menjadi sarana untuk meninjau hal apa saja yang dirasa perlu untuk dibenahi, diperbaiki dan ditingkatkan lagi guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh nasabahnya. (*)

Untuk memberikan contoh yang baik kepada seluruh pegawainya, bertepatan dengan hari berdirinya Bank Sumsel Babel yakni 6 November, segenap jajaran Direksi Bank Sumsel Babel turun langsung memberikan pelayanan kepada setiap nasabah Bank Sumsel Babel yang datang

Bank Sumsel Babel Gelar Donor Darah

Dalam rangka HUT Ke-60 Tahun Bank Sumsel Babel, kembali untuk kesekian kalinya Bank Sumsel Babel melaksanakan kegiatan sosial yakni Kegiatan Donor Darah yang bertempat di lantai IV Gedung Kantor Pusat Bank Sumsel Babel Jakabaring dengan tema pada tahun ini yakni "Saatnya Peduli Saatnya Berbagi".

Acara yang telah memasuki tahun ke-17 pelaksanaannya ini dihadiri oleh Direksi Bank Sumsel



Babel, Pemimpin Divisi, Pemimpin Bagian, Pemimpin Satuan, Pemimpin Cabang, Pengurus IIPK Bank Sumsel Babel, serta para peserta donor darah. Acara itu dapat terlaksana dengan baik berkat bantuan dan dukungan dari Tim Petugas PMI Kotamadya Palembang baik itu para dokter

maupun para perawat.

Pada tahun ini, calon peserta pendonor darah Bank Sumsel Babel yang telah terdaftar per tanggal 31 Oktober 2017 sebanyak 200 orang dan Bank Sumsel Babel berharap pelaksanaan

kegiatan ini akan terus bertambah seiring dengan berlangsungnya kegiatan donor darah tersebut.

Adapun tujuan acara yang dilaksanakan Bank Sumsel Babel itu merupakan wujud kepedulian pegawai Bank Sumsel Babel kepada sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan. (*)

wujudkan
impian dan
harapan hari tua



bebas
biaya administrasi

Pelayanan Terbaik
bagi PNS menjelang Pensiun

- Pinjaman dengan angsuran maksimal 90%
- Jangka waktu sampai dengan 20 tahun
- Bunga murah
- Proses cepat dan mudah

Info dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Bank Sumsel Babel terdekat



<http://www.banksumselbabel.com>



HANYA ADA
1 KATA

LAW - 1 ONE
FRAUD

LAaporkan
Melalui **Whistleblowing System**
Pelapor dirahasiakan dan dilindungi

Jika anda melihat, mengetahui, atau mengalami tindakan berindikasi pelanggaran pada Bank Sumsel Babel, **PERTAMA** Laporkan pada **Whistleblowing System** Bank Sumsel Babel

Telepon : 0711-5620202

E-mail : Satuan.antifraud@banksumselbabel.com

Line : Satuan.Antifraud

SMS : 0811-7808111

Website : www.banksumselbabel.com
law1fraud.banksumselbabel.com

WhatsApp : 0811-7808111



“satu klik”
untuk semua transaksi

**INTERNET BANKING
BANK SUMSEL BABEL**

aktifkan internet banking bank sumsel babel
sekarang juga,
nikmati kemudahan bertransaksi perbankan
dengan “satu klik”

**BEBAS BIAYA
SELURUH TRANSAKSI ***

*) - Gratis 1 (satu) bulan setelah pengaktifan
- Syarat dan ketentuan berlaku



1500711

